



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2023

HALAMAN VERIFIKASI


**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMANDAN
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

disusun Oleh :


**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 03 Juli 2023

Koordinator
Bidang Ekonomi, Sumberdaya
Alam dan Infrastruktur



ADI WIBOWO, S.T.
NIP. 198111012009031003

Petugas Verifikator


Ir. GUNADI, M.M.
NIP. 196807212007011017

Mengetahui,

• **KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG**


DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat disusun. Maksud dan tujuan penyusunan Renja ini adalah memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Urusan Pemerintahan Bidang Kawasan Permukiman, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan serta Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Disadari penyusunan Renja ini masih memiliki banyak kekurangan karena keterbatasan kami tidak sebanding dengan dinamika pembangunan yang berubah dengan cepat, oleh karena itu segala masukan dan saran dalam penyempurnaan penyusunan Renja ini sangat diharapkan demi terwujudnya perumahan dan permukiman layak huni serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung.

Kemudian kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Temanggung, 03 Juli 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,



HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan Capaian Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung	41
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	127
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	127
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung.....	128
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	133
4.1 Program dan Kegiatan	133
BAB V PENUTUP	152
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung s.d Tahun 2022.....	12
2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung s.d Triwulan I Tahun 2023.....	27
2.3	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DPRKPLH Kabupaten Temanggung Triwulan I Tahun 2023 Kabupaten Temanggung.....	42
2.4	Capaian Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni dari Tahun 2018-2023.....	56
2.5	Capaian Presentase Rumah Tidak Layak Huni.....	57
2.6	Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak tahun 2018-2023	58
2.7	Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023	59
2.8	Capaian Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan Tahun 2018-2023	60
2.9	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni.....	61
2.10	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	62
2.11	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	63
2.12	Capaian Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pertanahan.....	63
2.13	Capaian IKLH Kabupaten Temanggung.....	65
2.14	Capaian Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2020.....	66
2.15	Capaian Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2023.....	66
2.16	Data Rekomendasi Persejujuan UKL UPL dan AMDAK yang dikeluarkan sebelum terbitnya PP Nomor 22 Tahun 2021	68
2.17	Capaian Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.....	69
2.18	Capaian IKA Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.....	70

2.19	Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023	71
2.20	Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023	73
2.21	Luas Kekritisan Lahan di Kabupaten Temanggung	74
2.22	Capaian Proporsi Luas Lahan Kritis Terhadap total Luas Lahan Temanggung Tahun 2018-2023	75
2.23	Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Tahun 2018-2023	76
2.24	Tersentase Rekomendasi Izin Penyimpanan Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3) Tahun 2018-2020	78
2.25	Persentase Kajian Teknis Penyimpanan Limbah B3	79
2.26	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang Memiliki Izin	80
2.27	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.....	80
2.28	Daftar Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung	82
2.29	Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang diusulkan	84
2.30	Capaian Persentase Pengaduan Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti Tahun 2018-2023	85
2.31	Capaian Pengelolaan Sampah di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023	89
2.32	Capaian Cakupan Pelayanan Persampahan tahun 2018-2023.....	91
2.33	Daftar Depo Transfer Tahun 2023	92
2.34	Daftar TPS 3R Kabupaten Temanggung	92
2.35	Daftar Inventarisasi Aset Sarana Persampahan Kabupaten Temanggung	93
2.36	Daftar ALat Pengolahan Sampah di TPA Sanggrahan Kabupaten Temanggung	94
2.37	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuna Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	96
2.38	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024	103
2.39	Usulan-usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	121
2.40	Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2021-2023	123
2.41	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023	125

3.1	Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dengan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten temanggung Tahun 2024-2026.....	127
3.2	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024	130
4.1	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024	134
4.2	Rencana Program dan Kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024	141

DAFTAR GAMBAR

1.1	Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan.....	2
-----	--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

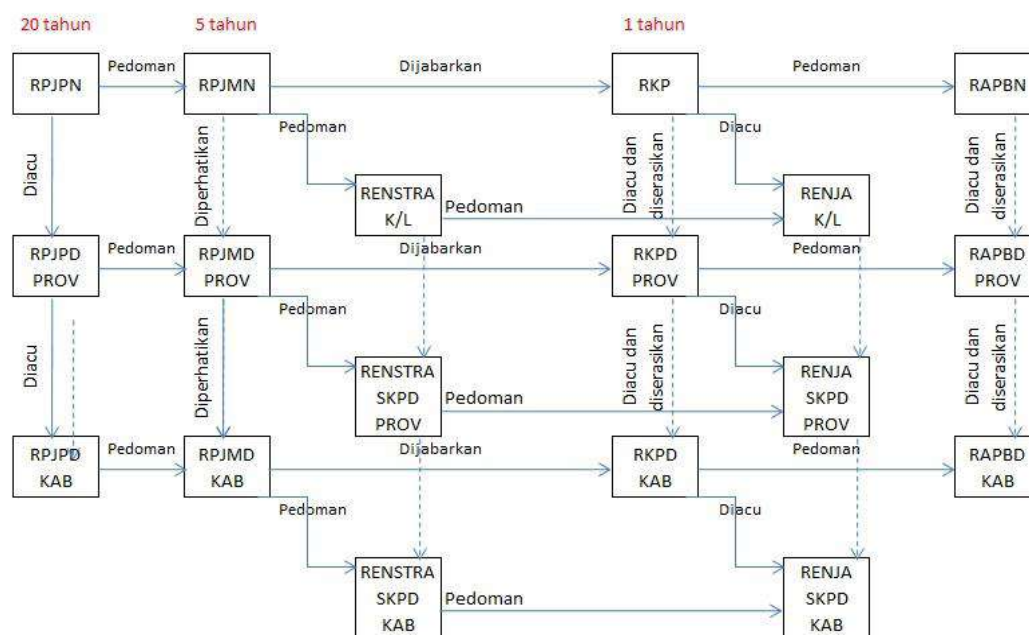
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan DPRKPLH Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di

Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPDP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal DPRKPLH Kabupaten Temanggung, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung;
- 2) Kondisi pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung

- 4) Data Pokok DPRKPLH Kabupaten Temanggung
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan DPRKPLH Kabupaten Temanggung;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung

b. Analisis gambaran pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung ;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung;
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun lalu berdasarkan renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan DPRKPLH

Kabupaten Temanggung. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);

- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung. Namun dalam proses ini DPRKPLH Kabupaten Temanggung mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung;

Penyusunan dokumen rancangan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung;

Penyempurnaan rancangan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada

saat desk rancangan kerja.

1. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024; dan

5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPRKPLH
KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan Capaian Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022 terhadap capaian Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung
s.d Tahun 2022

Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s/d 2022		Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH							2.717.885.000	2.717.885.000	-	2.716.675.371	-	99,96			
	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100		92,38		100			100		100		100		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota					1.525.951.000		2.717.885.000	2.717.885.000		2.716.675.371		99,96		4.242.626.371	
-	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Desa/ Kelurahan					3	-	900.000.000	3	900.000.000	100	100		900.000.000	
-	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Kegiatan				1.525.951.000	4	2.717.885.000	1.817.885.000	4	1.816.675.371	100	99,93		3.342.626.371	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (1) (%)												100				
Predikat												Sangat Tinggi				
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN							220.427.990	220.427.990		209.041.818		94,83			
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	5,00		8,85		6,35			5,25		100		5,25		

Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s/d 2022		Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi	%	86,80		92,98		86,78				100		100		100	
a	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus					374.694.474		220.427.990	220.427.990		209.041.818		94,83		374.694.569	
-	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kegiatan			1	374.694.474	1	220.427.990	220.427.990	1	209.041.818	100	94,83		374.694.569	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (2) (%)												100				
Predikat												Sangat Tinggi				
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN							2.218.544.000	2.233.544.000		2.215.404.347		99,19			
	Persentase Rumah Layak Huni	%	89,42		91,15		88,87			94,75		100		94,75		
	Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	%	18,25		5,55		18,50			4,86		100		4,86		
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100		100		100			100		100		100		

Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s/d 2022		Ket	
			K	Rp.	K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100		100			100				100			100		
a.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha					1.427.681.336		2.218.544.000	2.233.544.000		2.215.404.347		99,19		3.643.085.683		
-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit			60	1.335.278.275	32	2.190.685.000	515.000.000	31	499.651.347	96,88	97,02	91	1.834.929.622		Salah satu penerima juga tercatat pada Program BSPS sehingga mengundurkan diri dari program perbaikan RTLH dan memilih Program BSPS
-	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kegiatan			1	92.403.061	1	27.859.000	27.859.000	1	25.068.000	100	89,98	2	117.471.061		
-	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Unit			0	0	47	-	1.690.685.000	47	1.690.685.000	100	100	47	1.690.685.000		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (3) (%)												98,44					
Predikat												Sangat Tinggi					

Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s/d 2022		Ket	
			K	Rp.	K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN																
	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100		100		100				100		100		100		
5	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					39.009.000		35.000.000	35.000.000		34.785.750		99,39		73.794.750		
	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	62,73		100		60,50				100		100		100		
	Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	%	100		0		100				100		100		100		
a.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kot a					39.009.000		35.000.000	35.000.000		34.785.750		99,39		73.794.750		
-	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kot a	Dokumen			1	39.009.000		1	35.000.000	35.000.000		1	34.785.750	100	99,39	2	73.794.750

Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s/d 2022		Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Hidup Daerah Tiap tahun															
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (5) (%)												100				
Predikat												Sangat Tinggi				
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					2.541.721.007		758.102.400	758.102.200		660.210.223		87,09		3.201.931.230	
	Indeks Kualitas Air		46,00		54,45		46,00			52,22		100		52,22		
	Indeks Kualitas Udara		86,00		80,89		85,50			83,82		98,04		83,82		
a.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					363.500.407		157.863.900	157.863.700		152.812.790		96,80		516.313.197	
-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				54,45	47.664.000	46,00	29.999.900	29.999.900	52,22	29.596.750	100	98,66	100	77.260.750	
					80,89		85,50			83,82		98,04				
-	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Laboratorium Laboratorium Lingkungan Hidup dan	Bulan		12	315.836.407	12	127.864.000	127.863.800	12	123.216.040	100	96,37	24	439.052.447	

Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s/d 2022		Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Dokumen Mutu yang dilaksanakan															
b.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota					2.178.220.600		600.238.500	600.238.500		507.397.433		84,53		2.685.618.033	
-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kegiatan			1	2.178.220.600	1	600.238.500	600.238.500	1	507.397.433	100	84,53		2.685.618.033	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (6) (%)											99,51					
Predikat											Sangat Tinggi					
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					1.296.040.155		1.330.526.200	1.336.700.100		1.288.474.578		96,84		2.584.514.733	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan		74,33		74,33		74,33			74,33		100		74,33		
	Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung		0,067		0,10		0,067			1,75		100		1,75		
	Cakupan RTH Publik		0,07		1,10		0,07			1,10		100		1,10		
a.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota					1.296.040.155		1.330.526.200	1.336.700.100		1.288.474.578		96,84		2.584.514.733	
-	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Bulan			12	90.000.339	12	90.864.000	90.864.000	12	64.264.193	100	70,73	24,00	154.264.532	

Bidang / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s/d 2022		Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
-	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terpeliharanya taman kota	Bulan			12	1.206.039.816	12	1.239.662.200	1.245.836.100	12	1.224.210.385	100	98,26	24,00	2.430.250.201	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (7) (%)												100					
Predikat												Sangat Tinggi					
8	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)								10.000.000	10.000.000		8.805.000		88,05			
		Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	%	100	0			90,00			100		100		100		
a.	Penyimpanan Sementara Limbah B3						16.546.200		10.000.000	10.000.000		8.805.000		88,05			
-	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya fasilitasi penyusunan rincian teknis pengelolaan limbah B3 bagi usaha/kegiatan di Kabupaten Temanggung	Kegiatan			1	16.546.200	1	10.000.000	10.000.000	1	8.805.000	100	88,05	2	25.351.200	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (8) (%)												100					

Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s/d 2022		Ket	
			K	Rp.	K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
Predikat												Sangat Tinggi					
9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							35.001.300	35.001.300		31.893.000		91,12				
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100		100		90,00	35.001.300		100		100	91,12	100			
a.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota							35.001.300	35.001.300		31.893.000		91,12				
-	Pengawasan Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah	Kegiatan/ usaha			50		50	35.001.300	35.001.300	50	31.893.000	100	91,12	100	31.893.000		

Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s/d 2022		Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Daerah Kabupaten/Kota															
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (9) (%)												100				
Predikat												Sangat Tinggi				
10	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT															
	Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	26,88		27,33		26,75				27,87		100		27,87	
11	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					197.079.543		26.000.000	93.580.000		93.176.300		99,57		290.255.843	
	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	66,67		82,35		66,67				84,62		100		84,62	
a.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0	197.079.543		26.000.000	93.580.000		93.176.300		99,57		290.255.843	

Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s/d 2022		Ket	
			K	Rp.	K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
-	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Cakupan Sekolah Adiwiyata	Sekolah			12	197.079.543	10	26.000.000	93.580.000	4	93.176.300	40,00	99,57	16	290.255.843	Karena hanya 4 sekolah yang sanggup mengikuti dan memenuhi kriteria sekolah Adiwiyata pada tahun 2022
		Terlaksananya Proram Kampung Iklim (PROKLIM)	Lokasi					1			2		100		2		Realisasi capaian sebanyak 2 lokasi Proklam di Kabupaten Temanggung dari target 1 lokasi pada tahun 2022
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (11) (%)												70,00					
Predikat												Sedang					
12	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP																
		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100		100		100			100		100		100		

Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s/d 2022		Ket	
			K	Rp.	K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
13	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				0	0		8.206.727.300	8.768.726.400		8.568.821.698		97,72		14.909.367.099		
	Persentase sampah yang tertangani	%	38,20		21,97		36,70			59,06		100		59,06			
	Cakupan layanan persampahan	%	55,00		53,63		52,00			61,25		100		61,25	100		
a.	Pengelolaan Sampah				0	6.340.545.401		8.206.727.300	8.768.726.400		8.568.821.698		97,72		14.909.367.099		
-	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/ SPA Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Kebersihan Kota	Bulan		12	5.387.188.401	12	4.978.792.300	5.172.792.300	12	4.996.157.268	100	96,59	24	10.383.345.669		
Terlaksananya peningkatan kinerja Pengelolaan Persampahan		Bulan		12		12			12		100		24				
Terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan		Bulan		12		12			12		100		24				
-	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam mengelola sampah	Bulan		12	383.357.000	12	450.000.000	683.000.000	12	665.666.600	100	97,46	24	1.049.023.600		
Terlaksananya kegiatan dalam rangka peningkatan peran serta		Bulan				12			12		100		12				

Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s/d 2022		Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	masyarakat mengelola sampah															
	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Bulan					12			12		100		12		
-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kegiatan			0	0	1,00	245.535.000	380.534.100	1	380.103.362	100	99,89	1	380.103.362	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				1	570.000.000		2.532.400.000	2.532.400.000		2.526.894.468	100	99,78	5	3.096.894.468	
-	Pembangunan TPA/TPST/SPA / TPS-3R/TPS	Unit			1	570.000.000	4	2.532.400.000	2.532.400.000	4	2.526.894.468	100	99,78	5	3.096.894.468	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (13) (%)												100				
Predikat												Sangat Tinggi				
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							12.093.742.828	13.976.555.244		13.435.779.606		96,13			
	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100		100		100			100		100		100		

Bidang / Program / Kegiatan		Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s/d 2022		Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.419.376.020		11.331.616.036	12.954.432.544		12.462.314.530		96,20			
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan			14	12.287.664.920	13	11.331.616.036	12.954.432.544	13	12.462.314.530	100	96,20	27	24.749.979.450	
b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						109.580.850		93.946.100	93.946.100		87.531.750		93,17			
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan			12	3.416.500	12	5.998.500	5.998.500	12	5.979.500	100	99,68	24	9.396.000	
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan			12	18.713.750	12	20.999.100	20.999.100	12	20.849.250	100	99,29	24	39.563.000	
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan			12	20.570.800	12	21.950.000	21.950.000	12	21.653.800	100	98,65	24	42.224.600	
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Minum Harian Pegawai, Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan	Bulan			12	32.156.500	12	14.999.500	14.999.500	12	11.413.500	100	76,09	24	43.570.000	
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Bulan			12	34.723.300	12	29.999.000	29.999.000	12	27.635.700	100	92,12	24	62.359.000	
															0	-	
c.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						626.276.715		570.215.292	590.211.300		556.666.994		94,32	0	1.182.943.709	

Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s/d 2022		Ket	
			K	Rp.	K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah, Jasa Surat Menyurat	Bulan			12	3.862.100	12	6.000.000	6.000.000	12	5.455.000	100	90,92	24	9.317.100	
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Bulan			12	81.870.478	12	72.499.992	92.496.000	12	81.719.185	100	88,35	24	163.589.663	
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Umum Pelayanan Perkantoran	Bulan			12	452.226.447	12	491.715.300	491.715.300	12	469.492.809	100	95,48	24	921.719.256	
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						88.317.690		97.965.400	337.965.300		329.266.332		97,43	0	417.584.022	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Bulan			12	77.407.190	12	92.986.200	82.986.200	12	76.316.467	100	91,96	24	153.723.657	
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Unit					1		249.999.900	1	247.974.865	100	99,19			

Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Realisasi s/d 2021		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s/d 2022		Ket
			K	Rp.	K	Rp.	K	RENJA Rp.	DPPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bulan			12	10.910.500	12	4.979.200	4.979.200	12	4.975.000	100	99,92	24	15.885.500	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (14) (%)												100				
Predikat												Sangat Tinggi				
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH												97,09	96,94			
PREDIKAT												Sangat Tinggi				
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH												99,91				
PREDIKAT												Sangat Tinggi				
JUMLAH TOTAL REALISASI KEUANGAN							27.651.957.018	30.185.522.234		29.263.067.691						

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung
s.d Triwulan I Tahun 2023

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi per Triwulan I Tahun 2023		Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket
				K	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				5.803.600.000		4.581.624	-	4.581.624	-	0,08	
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100		100		100		100		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.803.600.000		4.581.624		4.581.624		0,08	
	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat				5.803.600.000		4.581.624		4.581.624		0,08	
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Kemloko Kec Kranggan)	Paket	1				0		0		
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Bansari Kec Bansari)	Paket	1				0		0		
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Gilingsari Kec Temanggung)	Paket	1				0		0		
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Giripurno Kec Ngadirejo)	Paket	1				0		0		
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Katekan Kec Ngadirejo)	Paket	1				0		0		
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa ...)	Paket	1				0		0		

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi per Triwulan I Tahun 2023		Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket
				K	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Mranggen Kidul Kec Bansari)										
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Pendowo Kec Kranggan)	Paket	1				0		0		
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Purborejo Kec Bansari)	Paket	1				0		0		
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Rowo Kec Kandangan)	Paket	1				0		0		
		Pembangunan Tangki septik Individu Perdesaan (Desa Traji Kec Parakan	Paket	1				0		0		
		Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan (Desa Wadas Kec Kandangan)	Paket	1				0		0		
		Terfasilitasinya pembangunan tangki septik di Kabupaten Temanggung	%	100		0,8		0,80		0,80		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (1) (%)										0,07		
Predikat										Rendah		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				220.427.990		48.192.390		48.192.390		21,86	
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	5,00		5,25		5,25		95,05		
		Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi	%	86,80		88,11		88,11		100		
a.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				220.427.990		48.192.390		48.192.390		21,86	
-	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah	Terlaksananya penatausahaan pemanfaatan 6	Bulan	12	220.427.990	3	48.192.390	3	48.192.390	25,00	21,86	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi per Triwulan I Tahun 2023		Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket
				K	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rusunawa di Kabupaten Temanggung										
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (2) (%)										25,00		
Predikat										Rendah		
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				1.222.738.800		6.272.847		6.272.847		0,51	
		Persentase Rumah Layak Huni	%	89,42		94,75		94,75		100		
		Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	%	18,25		4,86		4,86		100		
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100		100		100		100		
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100		100		100		100		
a.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				1.222.738.800		6.272.847		6.272.847		0,51	
-	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rumah tidak layak huni yang diperbaiki	Unit	77	1.197.000.000	0	-	0	-	0	0	
-	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Terfasilitasinya kegiatan bidang perumahan	Kegiatan	1	25.738.800	0,25	6.272.847	0	6.272.847	25,00	24,37	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (3) (%)										12,50		
Predikat										Rendah		
4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN											
		Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100		100		100		100		
5	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				125.000.000		3.090.300		3.090.300		2,47	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi per Triwulan I Tahun 2023		Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket
				K	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	62,73		100		100		100		
		Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup	%	100		0		0		0		
a.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				125.000.000		3.090.300		3.090.300		2,47	
-	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1	125.000.000	0	3.090.300	0	3.090.300	0	2,47	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (5) (%)										0		
Predikat										Rendah		
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				424.003.200		53.600.468		53.600.468		12,64	
		Indeks Kualitas Air		46,00		52,22		52,22		100		
		Indeks Kualitas Udara		86,00		83,82		83,82		97,47		
a.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				127.907.200		27.044.738		27.044.738		21,14	
-	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup dan Dokumen Mutu yang dilaksanakan	Bulan	12	127.907.200	3	27.044.738	3	27.044.738	25,00	21,14	
b.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan				296.096.000		26.555.730		26.555.730		8,97	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi per Triwulan I Tahun 2023		Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket
				K	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota											
-	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Terlaksananya konservasi dan rehabilitasi lahan di Kabupaten Temanggung	Kegiatan	1	296.096.000	0,10	26.555.730	0	26.555.730	10,00	8,97	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (6) (%)										17,50		
Predikat										Rendah		
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				1.081.798.800		246.177.911		246.177.911		18,50	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan		74,33		74,33		74,33		100		
		Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung		0,067		0,52		0,52		100		
		Cakupan RTH Publik		0,07		1,10		1,10		100		
a.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				1.081.798.800		246.177.911		246.177.911		18,50	
-	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Terpeliharanya Kebun Ngipik milik Pemda	Bulan	12	68.180.400	3	16.528.158	3	16.528.158	25,00	24,24	
-	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terpeliharanya taman kota	Bulan	12	1.013.618.400	3	229.649.753	3	229.649.753	25,00	22,66	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (7) (%)										25,00		
Predikat										Rendah		
8	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3	%	100		100		100		100		
9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN				35.001.300		6.272.847		6.272.847		17,92	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi per Triwulan I Tahun 2023		Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket
				K	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)											
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	%	100		0		0		0	17,92	
a.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				35.001.300		6.272.847		6.272.847		17,92	
-	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan/Usaha di Kabupaten Temanggung	Kegiatan/ usaha	50	35.001.300	0	6.272.847	0	6.272.847	0	17,92	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (9) (%)										0		
Predikat										Rendah		
10	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT											
		Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan	%	26,88		27,87		27,87		100		
11	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				30.000.000		3.787.000		3.787.000		12,62	
		Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	66,67		11,111		11,11		16,67		

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi per Triwulan I Tahun 2023		Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket
				K	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	a.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000		3.787.000		3.787.000		12,62	
	-	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Paket	1	30.000.000	0,2	3.787.000	0,20	3.787.000	20,00	12,62	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (11) (%)										20,00		
Predikat										Rendah		
	12	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP										
		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100		100		100		100		
	13	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			10.144.180.000		1.045.607.579		1.045.607.579		10,31	
		Persentase sampah yang tertangani	%	38,20		59,34		59,34		100		
		Cakupan layanan persampahan	%	55,00		61,94		61,94		100		
	a.	Pengelolaan Sampah			10.144.180.000		1.045.607.579		1.045.607.579		10,31	
	-	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Bulan	12	4.710.800.000	3	1.017.459.305	3	1.017.459.305	25,00	21,60	
		Terlaksananya peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Bulan	12		3		3		25,00		
		Terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan	Bulan	12		3	-	3		25,00		

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi per Triwulan I Tahun 2023		Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket
				K	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		Prasarana dan Sarana Persampahan										
-	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Bulan	12	300.000.000	3	-	3	-	25,00	0,00	
-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasional UPT TPA-IPLT Sanggrahan	Bulan	12	100.000.000	3	28.148.274	3	28.148.274	25,00	28,15	
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			5.033.380.000				-		0	
-	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				5.033.380.000		-		-		0	
		Pembangunan TPS3R Desa Danurejo Kec Kedu	unit	1		-	-	-	-	-	-	
		Pembangunan TPS3R Desa Gambasan Kec. Selopampang	unit	1		-		-		-		
		Pembangunan TPS3R Desa Kaloran Kec. Kaloran	unit	1		-		-		-		
		Pembangunan TPS3R Desa Mandisari Kecamatan Parakan	unit	1		-		-		-		
		Pembangunan TPS3R Desa Ngaditirto Kec. Selopampang	unit	1		-		-		-		
		Pembangunan TPS3R Desa Petirejo Kec. Ngadirejo	unit	1		-		-		-		
		Pembangunan TPS3R Desa Joho Kec. Temanggung	unit	1		-		-		-		
		Pembangunan TPS3R Desa Pare Kec. Kranggan	unit	1		-		-		-		
		Terlaksananya fasilitasi pembangunan TPS 3R	%	100		-		-		-		
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (13) (%)										8,93		
Predikat										Rendah		

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi per Triwulan I Tahun 2023		Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket
				K	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
14	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.941.367.556		2.838.548.189		2.838.548.189		21,93	
		Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100		100		100		100		
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.099.413.456		2.637.233.624		2.637.233.624		21,80	
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	13	12.099.413.456	3	2.637.233.624	3	2.637.233.624	23,08	21,80	
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah				101.268.000		15.079.500		15.079.500		14,89	
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	5.998.500	3	1.509.500	3	1.509.500	25,00	25,16	
-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	12	20.000.000	3	3.225.000	3	3.225.000	25,00	16,13	
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	20.000.000	3	1.578.000	3	1.578.000	25,00	7,89	
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Minum Harian Pegawai, Makanan dan Minuman Rapat, Tamu dan Kegiatan	Bulan	12	25.278.000	3	2.808.500	3	2.808.500	25,00	11,11	
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Bulan	12	29.991.500	3	5.958.500	3	5.958.500	25,00	19,87	
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				565.986.100		133.437.265		133.437.265		23,58	
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah, Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	2.000.000	3	293.350	3	293.350	25,00	14,67	

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi per Triwulan I Tahun 2023		Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket
				K	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Bulan	12	72.577.200	3	22.275.824	3	22.275.824	25,00	30,69	
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Umum Pelayanan Perkantoran	Bulan	12	491.408.900	3	110.868.091	3	110.868.091	25,00	22,56	
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				174.700.000		52.797.800		52.797.800		30,22	
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Oprasional dan Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Bulan	12	79.700.000	3	10.572.800	3	10.572.800	25,00	13,27	
-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Bulan	12	90.000.000	3	41.055.000	3	41.055.000	25,00	45,62	
-	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Bulan	12	5.000.000	3	1.170.000	3	1.170.000	25,00	23,40	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program (14) (%)										24,84		
Predikat										Rendah		
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH										13,38	13,29	
PREDIKAT										Rendah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH										87,36		
PREDIKAT										Tinggi		
JUMLAH TOTAL REALISASI KEUANGAN					32.028.117.646		4.256.131.155		4.256.131.155			
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja			Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan awal yang dilaksanakan oleh PPK maupun PPTK dalam upaya mencapai target yang telah ditetapkan serta adanya monitoring dan evaluasi secara rutin dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja			1. Adanya keterbatasan SDM maupun sarana dan prasarana pendukung kegiatan 2. Terdapat beberapa kegiatan yang tergantung dengan faktor eksternal sehingga dalam pelaksanaannya harus mengikuti kondisi alam maupun ketentuan dari pihak lain									

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target 2023		Realisasi per Triwulan I Tahun 2023		Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket
				K	DPA Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Tindak Lanjut yang dilakukan dalam triwulan berikut				Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pada Semester II agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai sebelum akhir tahun 2023								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Kabupaten/Kota berikutnya				Komitmen yang sungguh-sungguh dalam upaya mencapai target dari perencanaan yang tertuang pada Renja Tahun 2024 mendatang dengan mengacu dan berkesinambungan dengan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026								

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
 - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
 - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
 - Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
- Hal tersebut disebabkan kekurangan jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman untuk melakukan pendataan/pemutakhiran data sehingga salah satu penerima manfaat dari pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) juga tercatat pada Program BSPS. Berkaitan dengan hal tersebut yang bersangkutan mengundurkan diri dari program perbaikan RTLH dan memilih Program BPS.

- Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia
- Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Salah satu keluaran dari sub kegiatan ini yaitu Cakupan Sekolah Adiwiyata dari target yang ditetapkan yaitu 10 sekolah hanya tercapai 4 sekolah hal tersebut disebabkan karena hanya 4 sekolah tersebut yang sanggup mengikuti dan memenuhi kriteria sekolah Adiwiyata pada tahun 2022. Namun pada sisi yang lain keluaran dari sub kegiatan ini yaitu terlaksananya Program Kampung Iklim (PROKLIM) dari target yang ditetapkan 1 lokasi tercapai 2 lokasi.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) DPRKPLH Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori “ **Memuaskan** ” yaitu dengan nilai **100%** apabila dengan menggunakan pembanding target tahun 2022. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemerataan dan Infrastruktur Wilayah
Capaian Kinerja : 100 % Kategori Memuaskan
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Capaian Kinerja : 100 % Kategori Memuaskan.

Apabila pembanding dengan menggunakan target akhir Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 capaian kinerja dengan kategori “ **Baik** “ dengan nilai **99,53%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemerataan dan Infrastruktur Wilayah
Capaian Kinerja : 100 % Kategori Memuaskan
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Capaian Kinerja : 99,05 % Kategori Baik.

Dari Tabel 2.1. dan 2.2 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2022 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang

telah ditetapkan pada Perubahan Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah DPRKPLH Kabupaten Temanggung
 Triwulan I Tahun 2023 Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA						SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 2023		KETERANGAN
			2019	2020	2021	2022	2023	KONDISI AKHIR 2023	REALISASI	CAPAIAN	
A											
INDIKATOR SASARAN											
1	Persentase perumahan dan permukiman layak huni	%	Na	97,82	97,87	97,92	97,97	97,97	98,99	100	Telah Tercapai
2	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Angka	66,33	67,68	69,03	69,18	70,53	70,53	69,86	99,05	Upaya Keras
B											
INDIKATOR PROGRAM											
1	Persentase rumah tidak layak huni (RTLH)	%	10,57	9,13	7,72	6,35	5,00	5,00	5,25	95,05	Upaya Keras
2	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	86,74	86,74	86,76	86,78	86,8	86,8	88,11	100	Telah Tercapai
3	Persentase rumah layak huni	%	87,15	87,73	88,3	88,87	89,42	89,42	94,75	100	Telah Tercapai
4	Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	19,25	19	18,75	18,5	18,25	18,25	4,86	100	Telah Tercapai
5	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	-	-	100	100	100	100	100	100	Telah Tercapai
6	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	-	-	100	100	100	100	100	100	Telah Tercapai
7	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	-	-	100	100	100	100	100	100	Telah Tercapai
8	Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	TARGET KINERJA						SAMPAI DENGAN TRIWULAN I 2023		KETERANGAN
			2019	2020	2021	2022	2023	KONDISI AKHIR 2023	REALISASI	CAPAIAN	
9	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	54,4	56,4	58,45	60,5	62,73	62,73	100	100	Telah Tercapai
10	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	na	na	95,00	100	100	100	0	0	Upaya Keras
11	Indeks kualitas air	Angka	38,00	42,00	46,00	46,00	46,00	46,00	52,22	100	Telah Tercapai
12	Indeks kualitas udara	Angka	84,00	84,50	85,00	85,50	86,00	86,00	83,82	97,47	Upaya Keras
13	Indeks kualitas tutupan lahan	Angka	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	100	Telah Tercapai
14	Proporsi luas lahan kritis terhadap total luas lahan di Kabupaten Temanggung	%	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,52	100	Telah Tercapai
15	Cakupan RTH publik	%	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	1,10	100	Telah Tercapai
16	Persentase usaha yang memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3	%	-	-	80,00	90,00	100	100	100	100	Telah Tercapai
17	Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/ kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup	%	-	-	80,00	90,00	100	100	0	0	Upaya Keras
18	Cakupan sekolah berwawasan lingkungan	%	-	-	26,61	26,75	26,88	26,88	27,87	100	Telah Tercapai
19	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	-	-	66,67	66,67	66,67	66,67	11,11	16,67	Upaya Keras
20	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah Tercapai
21	Persentase sampah yang tertangani	%	31,96	32,00	35,04	36,70	38,20	38,20	59,34	100	Telah Tercapai
22	Cakupan layanan persampahan	%	-	-	50,00	52,00	55,00	55,00	61,94	100	Telah Tercapai

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Indikator Sasaran

Terdapat 1 Indikator Sasaran dengan status telah tercapai dan 1 Indikator masih memerlukan Upaya Keras dengan rincian sebagai berikut:

a. Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni dengan status Telah Tercapai,

Faktor pendorong : Adanya dukungan program-program dan kegiatan di bidang perumahan dan permukiman baik dari APBN maupun APBD antara lain:

1. Program Bankeupemdes RTLH Provinsi, Program BSPS, Baznas, dana desa utk RTLH, DAK Perumahan
2. Program DAK Sanitasi
3. Program Jamban dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Faktor penghambat : 1. Pemulihan pandemi penganggaran RTLH masih bertumpu dari Bankeu Prov dan APBN
2. Kuantitas/jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman kurang untuk melakukan pendataan/pemutakhiran data

Rekomendasi dan tindaklanjut : Pelaksanaan kegiatan tahun 2023 sesuai dengan perencanaan awal

b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih memerlukan Upaya Keras,

Faktor pendorong : Adanya dukungan anggaran dari APBD dan KLHK dalam pelaksanaan pengujian kualitas air dan udara di Kabupaten Temanggung

Faktor penghambat : Pengujian kualitas air maupun udara belum dilaksanakan pada triwulan I

tahun 2023 sehingga masih menggunakan data tahun 2022

Rekomendasi dan tindaklanjut : Evaluasi ketinggian dan arah shelter alat penangkap sumber pencemar pada pemasangan alat uji kualitas udara.

2. Indikator Program

Capaian program dengan status telah tercapai sebanyak 17 indikator program dengan rincian sebagai berikut:

a. Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi

Faktor pendorong : 1. Intervensi dari Pemerintah Pusat dan Daerah (Sandes, Sanimas, DAK Sanitasi) dalam peningkatan rumah tangga berakses sanitasi layak
2. Program jamban dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

Faktor penghambat : Kuantitas/jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman kurang untuk melakukan pendataan/pemutakhiran data

Rekomendasi dan tindaklanjut : Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Temanggung untuk penyediaan sanitasi layak masyarakat di Kabupaten Temanggung.

b. Persentase rumah layak huni

Faktor pendorong : Program-program di bidang perumahan dan permukiman khususnya penanganan RTLH menjadi RLH (sumber dana DAK, APBD Provinsi, APBN, Dana Desa, CSR dll),

Faktor penghambat : 1. Pemulihan pandemi penganggaran RTLH masih bertumpu dari Bankeu Prov dan APBN
2. Kekurangan jumlah personil ASN teknis bidang perumahan

permukiman untuk melakukan pendataan/ pemutakhiran data.

Rekomendasi dan tindaklanjut : Meningkatkan sinergitas dengan seluruh pihak terkait dalam memaksimal pelaksanaan pembangunan RTLH menjadi RLH serta melakukan pendataan lebih intensif dengan pihak terkait untuk keakuratan data jumlah rumah di Kabupaten Temanggung meliputi rumah layak huni dan tidak layak huni

c. Persentase kawasan kumuh perkotaan

Faktor pendorong : Adanya hadiah Lomba Hari Habitat yang menangani kawasan kumuh perkotaan

Faktor penghambat : 1. Terbatasnya anggaran
2. Kekurangan jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman untuk melakukan pendataan/ pemutakhiran data

Rekomendasi dan tindaklanjut : Meningkatkan sinergitas dengan DPUPR Kabupaten Temanggung dalam upaya pengurangan kawasan kumuh perkotaan

d. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni

Faktor pendorong : Penyediaan lahan relokasi masing-masing sebagai langkah mitigasi bencana pada area rawan bencana

Faktor penghambat : Terbatasnya anggaran

Rekomendasi dan tindaklanjut : Identifikasi mitigasi bencana dan menyiapkan lahan relokasi.

e. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni

Faktor pendorong : 1. Program Bantuan Rumah RUSPIN oleh Disperakim Provinsi Jawa Tengah
2. Ketersediaan tanah warga

Faktor penghambat : Kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk melaksanakan relokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah

Rekomendasi dan tindaklanjut : Meningkatkan sinergitas dengan Disperakim Jawa Tengah maupun Kementerian

f. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Faktor pendorong : 1. Penanganan ODF di Kabupaten Temanggung
2. Tersedianya Truck Tinja dan IPLT.

Faktor penghambat : 1. Masih menunggu penetapan Perda Retribusi
2. IPLT belum berfungsi optimal
3. Masih banyaknya jamban belum berseptitank

Rekomendasi dan tindaklanjut : 1. Melaksanakan program jamban keluarga
2. Mempersiapkan prasarana dan sarana dalam bidang sanitasi yang lebih lengkap lagi.

g. Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan

Faktor pendorong : Adanya koordinasi dengan pihak terkait penyelesaian fasilitasi pertanahan

Faktor penghambat : 1. Ketidaksesuaian peruntukkan tanah
2. Surat administrasi tanah tidak lengkap.

Rekomendasi dan tindaklanjut : Rapat koordinasi dan mediasi dengan pihak terkait,

h. Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Faktor pendorong : Penyusunan Dokumen RPPLH sudah dilaksanakan pada tahun 2021, Penyusunan Naskah Akademis di Tahun 2022 dan di Perda Kan Tahun 2023

Faktor penghambat : Masih menunggu pengesahan Perda RPPLH

Rekomendasi dan tindaklanjut : Dokumen RPPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2022 - 2052 akan di Perdakan di tahun 2023

i. Indeks Kualitas Air

Faktor pendorong : 1. Adanya dukungan anggaran dalam pelaksanaan pengujian kualitas air di Kabupaten Temanggung meskipun belum maksimal sehingga dapat dilaksanakan pengujian di beberapa sungai dari hulu, tengah dan hilir
2. Pengujian Kualitas Air yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Faktor penghambat : Data masih menggunakan hasil pengujian tahun 2022 karena sampai dengan triwulan I tahun 2023 belum ada data hasil pengujian

Rekomendasi dan tindaklanjut : Menunggu pelaksanaan pengujian tahun 2023

j. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Faktor pendorong : Sudah adanya Regulasi yang mengatur tentang tutupan lahan

Faktor penghambat : Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya tutupan lahan, masih fokus hanya pada keuntungan nilai ekonomi semata

Rekomendasi dan tindaklanjut : Memberikan edukasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya tutupan lahan untuk kelestarian lingkungan hidup

k. Proporsi Luas Lahan Kritis terhadap Total Luas Lahan di Kabupaten Temanggung

Faktor pendorong : Triwulan I Tahun 2023 telah dilaksanakan upaya penanganan lahan kritis dengan cara penanaman di 11 kecamatan dengan luasan kurang lebih 33,082 Ha serta adanya permohonan penanaman inisiasi mandiri seluas 20,138 Ha.

Faktor penghambat : Faktor cuaca, apabila dilaksanakan penanaman pada akhir musim penghujan ketersediaan air yang bersumber dari air hujan sedikit sehingga dikhawatirkan pertumbuhan tidak maksimal (persentase kematian tanaman tinggi)

Rekomendasi dan tindaklanjut : Inventarisasi calon lokasi penanaman pada awal musim penghujan berikutnya dan melaksanakan monitoring penanaman yang sudah dilakukan sebelumnya

1. Persentase usaha yang memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3

Faktor pendorong : 1. Adanya regulasi yang mewajibkan setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan dan melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 untuk menyusun rincian teknis
2. Adanya 1 permohonan dan kajian dilakukan terhadap dokumen yang diajukan

Faktor penghambat : Peraturan baru keluar tahun 2021 yaitu PP Nomor 22 Tahun 2021 dan Permen LHK

turunannya, sehingga Kegiatan dan/atau Usaha masih menyesuaikan dengan peraturan baru tersebut

Rekomendasi dan tindaklanjut : Mendorong Usaha dan/atau Kegiatan untuk membuat rincian teknis atau persetujuan teknis limbah B3

m. Cakupan RTH Publik

Faktor pendorong : Responsibilitas masyarakat terhadap RTH Publik

Faktor penghambat : 1. Keterbatasan lahan RTH
2. Keterbatasan anggaran untuk penyediaan RTH Publik / taman
3. Pengelolaan dan penataan terbatas
4. Jumlah SDM yang terbatas

Rekomendasi dan tindaklanjut : Pengelolaan RTH Publik yang sudah ada

n. Cakupan sekolah berwawasan lingkungan

Faktor pendorong : Sinergitas antara DPRKPLH dengan instansi terkait serta Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan Sekolah yang berwawasan lingkungan serta peran serta Sekolah Adiwiyata untuk melaksanakan pembinaan terhadap sekolah lain dalam upaya mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan

Faktor penghambat : Rendahnya minat sebagian sekolah di Kabupaten Temanggung untuk mengikuti Program Sekolah Adiwiyata

Rekomendasi dan tindaklanjut : Memaksimalkan potensi Sekolah di Kabupaten Temanggung untuk menjadi Sekolah Adiwiyata

o. Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

Faktor pendorong : Adanya sinergitas antar SKPD terkait dalam penyelesaian aduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung

Faktor penghambat : Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat, pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup

Rekomendasi dan tindaklanjut : Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan agar meminimalisir dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup

p. Persentase sampah yang tertangani

Faktor pendorong : SE Bupati Nomor 660.1/002 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Tingkat Desa se-Kabupaten Temanggung

Faktor penghambat : 1. Belum semua desa memahami SE Bupati tersebut
2. Kurangnya sarana prasarana pengelolaan persampahan untuk menjangkau seluruh wilayah
3. Kurangnya tenaga pelayanan kebersihan
4. Umur TPA semakin berkurang karena timbulan sampah yang bertambah sedangkan luasan TPA tetap

Rekomendasi dan tindaklanjut : 1. Sosialisasi hingga tingkat desa dan meningkatkan peran serta

masyarakat beserta lembaga pengelolaan sampah di tingkat kecamatan, desa, hingga rumah tangga

2. Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
3. Penambahan tenaga pelayanan /kebersihan
4. Pengadaan tanah untuk perluasan TPA dan operasional TPA agar dapat menangani sampah dengan maksimal
5. Sosialisasi agar memaksimalkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan menegaskan bahwa hanya sampah residu yang diangkut ke TPA

q. Cakupan layanan persampahan

Faktor pendorong : Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Faktor penghambat : 1. Jarak Tempuh desa-desa di wilayah Temanggung bagian Utara ke TPA Sanggrahan yang jauh
2. Kondisi geografi desa di Kabupaten Temanggung yang beragam
3. Pelaksanaan dan peruntukan anggaran belum sesuai dengan SE Nomor 660.1/002 Tahun 2021

Rekomendasi dan tindaklanjut : 1. Sosialisasi agar memaksimalkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan menegaskan bahwa hanya sampah residu yang diangkut ke TPA
2. Koordinasi dan kerjasama antar desa untuk penentuan tempat

pengumpulan sampah sementara di tingkat kecamatan atau antar desa di suatu titik yang dapat dijangkau kendaraan pengangkut sampah

Capaian program dengan status akan tercapai sebanyak 5 indikator program dengan rincian sebagai berikut:

a. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Faktor pendorong : Program-program di bidang perumahan dan permukiman khususnya penanganan RTLH menjadi RLH (sumber dana DAK, APBD Provinsi, APBN, Dana Desa, CSR dll),

Faktor penghambat : 1. Pemulihan pandemi penganggaran RTLH masih bertumpu dari Banku Prov dan APBN
2. Kekurangan jumlah personil ASN teknis bidang perumahan permukiman untuk melakukan pendataan/ pemutakhiran data.

Rekomendasi dan tindaklanjut : 3. Meningkatkan sinergitas dengan seluruh pihak terkait dalam memaksimal pelaksanaan pembangunan RTLH menjadi RLH serta melakukan pendataan lebih intensif dengan pihak terkait untuk keakuratan data jumlah rumah di Kabupaten Temanggung meliputi rumah layak huni dan tidak layak huni
4. Potensi pembangunan RTLH menjadi RLH pada tahun 2023 sebanyak 872 unit rumah

b. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup

Faktor pendorong : Adanya permohonan persetujuan Amdal

Faktor penghambat : Permohonan persetujuan Amdal baru diproses, tahapan baru sampai pada verifikasi teknis dokumen KA Amdal, Andal RKL RPL di DLHK Provinsi Jateng

Rekomendasi dan tindaklanjut : Koordinasi dengan DLHK Provinsi Jawa Tengah

c. Indeks Kualitas Udara

Faktor pendorong : Adanya sinergi antara DPRKPLH Kabupaten Temanggung Kementerian LHK dalam pengujian kualitas udara di Kabupaten Temanggung

Faktor penghambat : Pengujian kualitas udara secara serentak akan dilaksanakan pada akhir bulan Juni dan akan selesai pada bulan Juli 2023 sehingga capaian triwulan I 2023 data masih menggunakan realisasi tahun 2022

Rekomendasi dan tindaklanjut : Evaluasi ketinggian dan arah shelter alat penangkap sumber pencemar pada pemasangan alat uji kualitas udara.

d. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

Faktor pendorong : Adanya Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Pengendali Dampak Lingkungan di DPRKPLH Kabupaten Temanggung

Faktor penghambat : Sampai dengan triwulan I tahun 2023 belum dilaksanakan monev terhadap

kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung

Rekomendasi dan tindaklanjut : Rencana pelaksanaan kegiatan di mulai bulan Mei 2023

e. Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup

Faktor pendorong : Juara harapan I Lomba Habitat tingkat Provinsi untuk kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo

Faktor penghambat : 1. Informasi terkait dengan penghargaan sebagian besar diumumkan pada akhir tahun
2. Ada beberapa penghargaan yang tidak diselenggarakan tiap tahun

Rekomendasi dan tindaklanjut : 1. Melaksanakan koordinasi awal pengusulan lokasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Tahun 2023 Desa Baturesari dan Desa Petarangan Kecamatan Kledung serta Desa Ketitang Kecamatan Jumo
2. Melaksanakan sosialisasi tata cara pengisian Aplikasi Sidiajeng untuk Pengusulan Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi (CSAP) yang diikuti oleh 11 Sekolah Adiwiyata Kabupaten

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung terdiri dari 4 jenis data pokok yaitu Data Pokok Pemerintahan, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Pertanian dan Data Pokok Bidang Lingkungan Hidup, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

a. Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni

Persentase perumahan dan permukiman layak huni merupakan gambaran kondisi perumahan dan permukiman layak huni untuk mengetahui kondisi permukiman dan perumahan yang layak huni di Kabupaten Temanggung. Sebagai landasan hukum yang digunakan yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018.

Rumus indikator kinerja menggunakan 16 indikator kumuh dengan formulasi perhitungan luas perumahan dan permukiman non kumuh dibagi luas kawasan permukiman dikali 100%.

Tabel 2.4
Capaian Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni
dari Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Luas Kawasan Permukiman non Kumuh	Na	Na	13.560,42	13.598,74	13.598,74	13.598,74
Luas Permukiman Wilayah Kabupaten	Na	Na	13.737,26	13.737,26	13.737,26	13.737,26
Persentase (%)	Na	Na	98,71	98,99	98,99	98,99

b. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Sebagai dasar hukumnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus yaitu jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%. Realisasi

persentase rumah tidak layak huni tahun 2018-2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Jumlah RTLH di Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 sampai triwulan I tahun 2023 menurun dari 26.624 unit menjadi 11.421 unit atau secara persentase 5,25% dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 5,00%. Kondisi sampai akhir tahun tahun 2022 yaitu sebanyak 11.421 RTLH dari 217.652 rumah di Kabupaten Temanggung dengan persentase 5,25%. Pembangunan RTLH tahun 2022 dilaksanakan dari berbagai sumber dana dengan jumlah pembangunan 1.588 unit yang terdiri dari BSPS sejumlah 775 unit, DAK sejumlah 47 unit, APBD Provinsi sejumlah 276 unit, APBD Kabupaten sejumlah 32 unit, Dana Desa sejumlah 448 unit, serta TMMD sejumlah 10 unit. Capaian persentase rumah tidak layak huni dari tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Capaian Persentase Rumah Tidak Layak Huni

No	Uraian	Capaian Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah RTLH (unit)	26.624	22.940	17.535	13.125	11.421	11.421
2	Jumlah Rumah se-Kabupaten Temanggung (unit)	204.313	215.051	215.918	216.785	217.652	217.652
3	Persentase (%)	13,03	10,67	8,12	6,05	5,25	5,25

c. Cakupan Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Sanitasi

Akses sanitasi ditinjau dari Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), cuci tangan pakai sabun dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Sanitasi tersebut dipengaruhi oleh perilaku yang disengaja dalam budaya hidup bersih dan sehat. Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi dapat diketahui dengan

formulasi perhitungan jumlah rumah tangga terlayani sanitasi dibagi jumlah rumah tangga dikalikan 100%. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Rumah Tangga Berakses Sanitasi Layak Tahun 2018-2023

NO	URAIAN	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi layak (unit)	162.853	177.265	181.568	186.290	198.531	198.531
2	Jumlah rumah tangga (unit)	196.536	196.536	196.536	225.325	225.325	225.325
3	Persentase (%)	82,86	90,19	92,38	82,68	88,11	88,11

d. Persentase Rumah Layak Huni

Salah satu penanganan penting dalam bidang perumahan dan penanganan kemiskinan selama 5 tahun terakhir adalah pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi rumah layak huni (RLH). Pembangunan RTLH dilakukan secara bersinergi, dengan melibatkan secara langsung komponen masyarakat. Pembangunan RTLH menggunakan berbagai sumber pendanaan meliputi APBD Kabupaten Temanggung, APBD Provinsi dan APBN melalui Kementerian Perumahan Rakyat maupun Kementerian Sosial RI. Rumah layak huni merupakan bagian lain atau kebalikan dari rumah tidak layak huni (RTLH), sehingga angka rumah layak huni didapat dari jumlah rumah dikurangi RTLH. Rumus untuk memperoleh persentase rumah layak huni adalah jumlah rumah layak huni tahun n dibagi jumlah rumah tinggal tahun n dikali 100%. Adapun perkembangan jumlah rumah tidak layak huni dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7
 Persentase Rumah Layak Huni Kabupaten Temanggung
 Tahun 2018-2023

NO	URAIAN	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah layak huni (unit)	169.912	173.702	177.349	179.150	206.231	206.231
2	Jumlah rumah (unit)	196.536	196.536	196.536	196.536	217.652	217.652
3	Persentase (%)	86,45	88,38	90,24	91,15	94,75	94,75

e. Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan

Kawasan kumuh perkotaan adalah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin dan pada umumnya terjadi di perkotaan. Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan tergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat tingkat kepadatan kawasan, kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut. Wilayah di Kabupaten Temanggung telah diidentifikasi Kawasan Kumuh yang ada sehingga untuk lebih mengintensifkan dan memfokuskan penanganannya telah dibuat SK Bupati Kawasan Kumuh sebagai dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. Formulasi perhitungan dengan menggunakan rumus Luas Kawasan Kumuh dibagi dengan luas Kawasan Perkotaan dikali 100 % (138,52 Ha dibagi 2.495,69 Ha X 100%) = 5,55%. Capaian dari tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8
Capaian Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan
Tahun 2018-2023

NO	URAIAN	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	297,81	297,81	176,84	138,52	121,41	121,41
2	Luasan Permukiman Perkotaan (Ha)	2.495,69	2.495,69	2.495,69	2.495,69	2.495,69	2.495,69
3	Persentase (%)	11,93	11,93	7,09	5,55	4,86	4,86

f. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni

Bencana alam pada suatu daerah merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya hal ini sering mengakibatkan kerugian bagi warga terdampak. Setiap warga Negara yang terdampak bencana yang mengakibatkan kerusakan tempat tinggal berhak mendapatkan rumah layak huni yang mana merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten. Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung dengan target yang ditetapkan adalah 100% setiap tahun. Formulasi perhitungan yang digunakan adalah jumlah rumah kena bencana yang tertangani dibagi jumlah rumah yang terkena bencana dikalikan 100%. Capaian dari tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.9
 Persentase Warga Negara Korban Bencana
 yang Memperoleh Rumah Layak Huni

NO	URAIAN	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah kena bencana yang tertangani (unit)	Na	Na	Na	0	0	0
2	Jumlah rumah yang terkena bencana (unit)	Na	Na	Na	0	0	0
3	Persentase (%)	Na	Na	Na	100	100	100

g. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni

Dalam pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah akan menimbulkan dampak bagi warga sekitar antara lain relokasi rumah warga, maka dari itu tiap rumah hunian warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah berhak memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni dan itu merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Daerah. Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung dengan target yang ditetapkan adalah 100% setiap tahun.

Formulasi perhitungan yang digunakan adalah Jumlah rumah relokasi yang tertangani dibagi jumlah rumah yang terkena relokasi dikalikan 100%. Capaian dari tahun 2018-2028 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10
 Persentase warga negara yang terkena relokasi
 akibat program pemerintah daerah yang memperoleh
 fasilitas penyediaan rumah yang layak huni

NO	URAIAN	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah relokasi yang tertangani (unit)	Na	Na	37	0	0	10
2	Jumlah rumah yang terkena relokasi (unit)	Na	Na	27	0	0	10
3	Persentase (%)	Na	Na	100	100	100	100

2. Data Pokok Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari berbagai unsur. Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne diase* (Penyakit yang ditularkan dari air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas. Maka dari itu salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah adalah Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung.

Formulasi perhitungan yang digunakan adalah jumlah rumah yang terlayani infrastruktur limbah dibagi jumlah total rumah dikalikan 100% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian indikator tersebut di atas dari tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.11
Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

NO	URAIAN	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah rumah yang terlayani infrastruktur (unit)	Na	Na	Na	181.568	217.652	217.652
2	Jumlah total rumah (unit)	Na	Na	Na	196.536	217.652	217.652
3	Persentase (%)	Na	Na	Na	92,38	100	100

3. Data Pokok Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

a. Persentase Penyelesaian Fasilitas Pertanahan

Penyelesaian fasilitas pertanahan adalah program penyelesaian permasalahan pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Persentase penyelesaian fasilitas pertanahan dihitung dengan membagi jumlah fasilitas permasalahan pertanahan teratasi dibagi jumlah fasilitas permasalahan pertanahan dikalikan 100%.

Realisasi persentase penyelesaian fasilitas pertanahan di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018-2023 belum ada data lengkap. Capaian untuk tahun 2023 sampai dengan triwulan I realisasi sebesar 100%.

Tabel 2.12
Capaian Persentase Penyelesaian Fasilitas Pertanahan

NO	URAIAN	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah fasilitas permasalahan pertanahan teratasi	Na	8	8	39	8	4

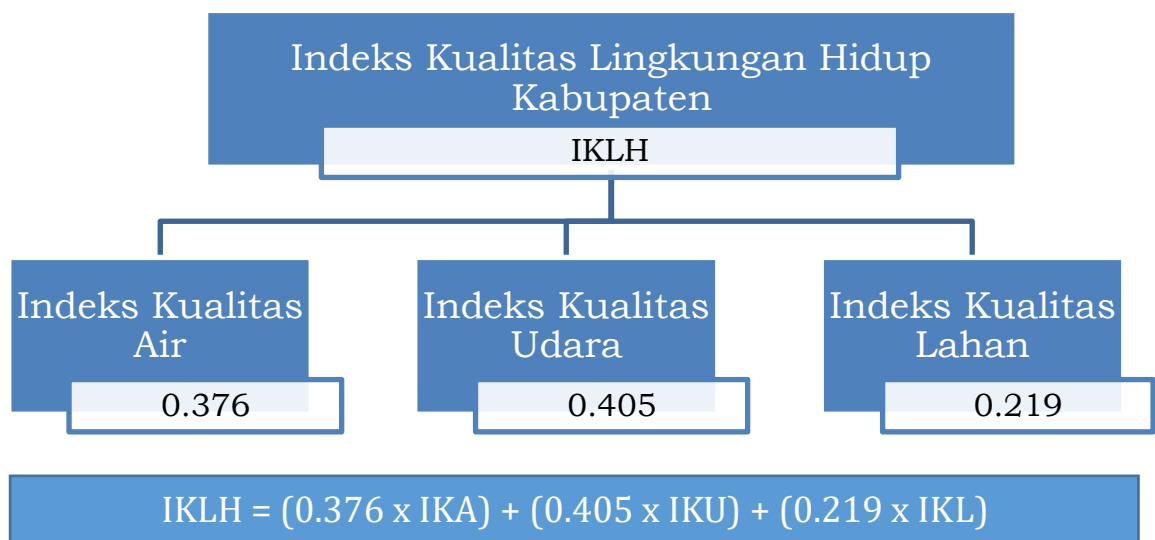
NO	URAIAN	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2	Jumlah fasilitasi permasalahan pertanahan	Na	8	8	39	8	4
3	Persentase (%)	Na	100	100	100	100	100

4. Data Pokok Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perhitungan IKLH telah mengalami beberapa kali penyesuaian, perbedaan terletak pada cara perhitungan dan parameter yang digunakan. Cara perhitungan IKLH mulai akhir tahun 2020 menggunakan rumus sebagai berikut:



Klasifikasi dan Rentang Nilai IKLH

Sangat Baik	90 - 100
Baik	70 - 89,9
Sedang	50 - 69,9
Buruk	25 - 49,9
Sangat Buruk	0 - 24,9

Sumber Data : Metode Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2020 -2024 KLHK

Capaian IKLH Kabupaten Temanggung dari tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.13
Capaian IKLH Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN	CAPAIAN TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
	IKLH	63,78	69,65	65,61	69,51	69,86	69,86
1	IKU	83,50	81,96	83,65	80,89	83,82	83,82
2	IKA	30,00	51,11	41,11	54,45	52,22	52,22
3	IKL	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33
	Perhitungan Rumus Lama	Perhitungan Rumus Baru					
	IKLH = (30% X IKA)+(30% X IKU)+(40% X IKTL)	IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)					

b. Persentase Dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan Dokumen yang memuat akan perencanaan tentang beberapa hal antara lain: pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Formulasi yang digunakan pada indikator tersebut di atas adalah jumlah dokumen RPPLH yang tersusun dibagi jumlah dokumen RPPLH yang wajib ada dikalikan 100%.

Tabel 2.14
Capaian Persentase Dokumen Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tahun 2018-2020

Uraian	Capaian s.d Tahun		
	2018	2019	2020
Kegiatan dan/atau Usaha Yang Memiliki Dokumen Lingkungan	1.012	1.694	1.892
Kegiatan dan/atau Usaha di Kabupaten Temanggung	1.934	2.760	6.033
Persentase (%)	52,33	61,38	31,36

Dari tabel di atas dapat diketahui capaian persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Mulai tahun 2021 ada perubahan perhitungan indikator tersebut di atas sehingga capaian tahun 2021-2023 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020, adapun capaian tahun 2021-2023 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Capaian Persentase Dokumen Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tahun 2021-2023

Uraian	Capaian sampai dengan		
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Jumlah Dokumen RPPLH yang Tersusun (Dokumen)	1	1	1
Jumlah Dokumen RPPLH yang Wajib ada (Dokumen)	1	1	1
Persentase (%)	100	100	100

Pada Tahun 2021 Kabupaten Temanggung telah menyusun Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2052 sebagai upaya perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu mulai tahun 2022 s.d tahun 2052 di Kabupaten Temanggung. Faktor

penghambatnya adalah dokumen RPPLH belum di Perda-kan sedangkan tindaklanjutnya adanya fasilitasi penyusunan Naskah Akademis RPPLH oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 dan penyusunan Perda ditahun 2023 ini.

c. Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

Persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan lingkungan dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal, atau penyusunan formulir UKL UPL dan pemeriksaan formulir UKL UPL. Setiap usaha dan/atau kegiatan memiliki dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen Amdal. Sedangkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen UKL UPL. Sebelum terbitnya PP Nomor 22 tahun 2021 Izin Lingkungan yang dikeluarkan merupakan persetujuan rekomendasi sedangkan setelah terbitnya PP Nomor 22 tahun 2021 persetujuan lingkungan yang dikeluarkan adalah persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup merupakan jumlah kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi mencemari lingkungan yang sudah memiliki persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup dibagi total kegiatan dan/atau usaha yang mengajukan persetujuan. Dasar Hukum indikator program di atas adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Formulasi perhitungan indikator program di atas adalah jumlah persetujuan UKL UPL dan AMDAL yang dikeluarkan dibagi jumlah perusahaan atau kegiatan yang mengajukan persetujuan dikali dengan 100%. Capaian indikator program dari tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.16
Data Rekomendasi Persetujuan UKL UPL dan AMDAL yang dikeluarkan sebelum terbitnya PP Nomor 22 Tahun 2021

NO	URAIAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Rekomendasi Persetujuan UKL UPL dan AMDAL yang dikeluarkan	18	14	17	0

NO	URAIAN	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
2	Jumlah Perusahaan atau Kegiatan yang Mengajukan Rekomendasi Persetujuan	18	14	17	0
	Persentase	100	100	100	0

Tabel 2.17
Capaian Persentase Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

NO	URAIAN	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Persetujuan UKL UPL dan AMDAL yang dikeluarkan	Na	Na	Na	0	1	0
2	Jumlah Usaha atau kegiatan yang mengajukan persetujuan	Na	Na	Na	0	1	1
3	Persentase	Na	Na	Na	0	100	0

Pada tahun 2022 capaian persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup sudah mencapai target, dari 1 usaha/kegiatan yang mengajukan persetujuan lingkungan sudah dapat dilakukan penilaian dan diterbitkan persetujuan. Sedangkan tahun 2023 sampai dengan triwulan I capaian masih 0, hal ini disebabkan oleh Permohonan dari RSK Ngesti Waluyo Parakan terkait permohonan persetujuan Amdal baru diproses, masih dalam tahapan verifikasi teknis dokumen KA Amdal, Andal RKL RPL di DLHK Provinsi Jawa Tengah. Sebagai upaya tindaklanjutnya melakukan koordinasi dengan DLHK Provinsi Jawa Tengah.

d. Indeks Kualitas Air (IKA)

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam

kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, disisi lain sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu : pH, TSS,DO,COD,BOD, Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform.

Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)

Rumus Metode IP :

$$\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$$

$$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{\text{Rata-rata}}^2 + (C_i/L_{ij})_{\text{Maksimum}}^2}{2}}$$

$0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu)
 $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemaran ringan
 $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemaran sedang
 $PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemaran berat

Tabel 2.18
Capaian IKA Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

IKA	Capaian Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	30,00	51,11	41,11	54,45	52,22	52,22

e. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Udara pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan IKU menyesuaikan perubahan peraturan yang ada yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara dan yang terbaru dengan Indeks Udara Model EU, Sehingga data yang diperoleh pun berbeda.

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Parameter pencemar udara untuk IKU : SO₂ dan NO₂, Parameter PM 2.5 digunakan sebagai Indikator Kinerja PPU Perkotaan,
- b. Lokasi sampling minimal 4 lokasi per kabupaten/kota:
 - Daerah padat transportasi (jalan utama yg lalu lintasnya padat)
 - Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya),
 - Pemukiman padat penduduk (urban background),
 - Kawasan komersil (perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi,
- c. Metode pemantauan : otomatis dan/atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata-rata tahunan,
- d. Jumlah data minimum (frekuensi dan periode pemantauan):
 - Passive sampler minimal : 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali),
 - Manual aktif minimal : 24 hari per tahun (2 kali per bulan@24 jam),
- e. Mengacu pada baku mutu EU yaitu SO₂ = 20 µg/m³ dan NO₂ = 40 µg/m³,
- f. Ieu = 50%IndeksNO₂ + 50% IndeksSO₂ ,
- g. Rumus Indeks Kualitas Udara IKU = Indeks Kualitas Udara = 100 – [50/0.9x (Ieu – 0.1)].

Capaian Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.19
 Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung
 Tahun 2018-2023

IKU	Capaian s.d Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	83,50	81,96	83,65	80,89	83,82	83,82

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai IKU dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Untuk tahun 2022 Kegiatan pengukuran kualitas udara ambien tahun 2022 dilakukan 2 kali yaitu disemester I dan II dengan hasil 83,82. Sedangkan tahun 2023 sampai triwulan I masih menggunakan data tahun 2022.

f. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITL) yang digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKLH) sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau, oleh karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang mengkolaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan indeks tutupan yang meliputi tutupan hutan, tutupan vegetasi dan tutupan non vegetasi. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dihitung dengan menjumlahkan nilai dari lima indeks penyusunan yang telah diberikan bobot. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$IKTL = 0,23 ITH + 0,24 IPH + 0,30 IKT + 0,15 IKBA + 0,08 IKH$$

Keterangan :

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

ITH = Indeks Tutupan Hutan

IPH = Indeks Performance Hutan

IKT = Indeks Kondisi Tutupan Tanah

IKBA = Indeks Konservasi Badan Air

IKH = Indeks Kondisi Habitat

Tabel 2.20
 Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
 Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

IKTL	Capaian s.d Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33	74,33

Dari tabel di atas dapat diketahui dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Temanggung sama yaitu sebesar 74,33%. Faktor pendorong capaian nilai IKTL Kabupaten Temanggung tahun 2023 adalah sudah adanya regulasi dan aplikasi IKLH yang mengatur tentang tutupan lahan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya tutupan lahan, masih fokus hanya pada keuntungan nilai ekonomi semata. Untuk rekomendasi dan tindak lanjut salah satu cara yang dilakukan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat umum di Kabupaten Temanggung tentang pentingnya tutupan lahan untuk kelestarian lingkungan hidup.

Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai batas yang ditentukan atau diharapkan, sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Lahan kritis ditandai oleh rusaknya struktur tanah, menurunnya kualitas dan kuantitas bahan organik, defisiensi hara dan terganggunya siklus hidrologi, perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya agar lahan dapat kembali berfungsi sebagai suatu ekosistem yang baik atau menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis bagi manusia.

Penyebab terjadinya lahan kritis :

1. Perubahan dalam pengelolaan lahan, menyebabkan hutan-hutan menjadi gundul karena mengalami alih fungsi menjadi lahan pertanian, perumahan dan

lainnya. Alih fungsi kawasan hutan menurunkan luasan kawasan hutan, sehingga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air, terjadinya erosi dan longsor, pendangkalan sungai sehingga membawa dampak perubahan ke arah lahan kritis,

2. Pola pertanian tidak ramah lingkungan. Praktek sistem pertanian yang tidak memperhatikan konsep dan usaha pengawetan (konservasi) tanah. Lahan-lahan pertanian yang terus ditanami tanpa diikuti pengelolaan tanaman, tanah dan air secara tepat, akan mengakibatkan penurunan produktivitas tanahnya. Penurunan produktivitas tanah disebabkan karena terjadi penurunan kesuburan tanahnya yang semakin lama akan menjadi lahan kritis,

3. Kebakaran hutan,

Sasaran lahan kritis adalah lahan-lahan dengan fungsi lahan yang ada kaitannya dengan kegiatan reboisasi dan penghijauan, yaitu fungsi kawasan hutan lindung, fungsi kawasan lindung di luar kawasan hutan dan fungsi kawasan budidaya untuk usaha pertanian. Penetapan lahan kritis didasarkan pada kondisi penutupan lahan, kelerengan, tingkat erosi, kondisi batuan dan produktivitas lahan dan diuraikan untuk masing-masing kawasan dengan perincian kondisi tidak kritis (TK), Potensial kritis (PK), Agak Kritis (AK), Kritis (K) dan Sangat Kritis (SK). Berdasarkan perincian tersebut, kondisi lahan kritis di wilayah Kabupaten Temanggung diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.21
Luas Kekritisian Lahan di Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)						Jumlah
		Tdk Kritis (TK)	Potensial Kritis (PK)	Agak Kritis (AK)	Kritis (K)	Sangat Kritis (SK)	Non Pertanian	
1	Bansari	472.64	1,394.76	192.50	-	-	-	2,059.90
2	Bulu	1,694.31	2,156.60	495.16	67.70	-	-	4,413.77
3	Kledung	131.50	2,536.51	1,198.24	258.35	-	-	4,124.60
4	Ngadirejo	2,179.61	1,133.81	261.11	-	-	-	3,574.53

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)						Jumlah
		Tdk Kritis (TK)	Potensial Kritis (PK)	Agak Kritis (AK)	Kritis (K)	Sangat Kritis (SK)	Non Pertanian	
5	Parakan	1,554.84	540.89	135.15	85.21	-	-	2,316.09
6	Selopampang	905.29	1,213.84	305.04	-	-	-	2,424.17
7	Tembarak	890.07	1,026.91	323.56	7.64	-	-	2,248.18
8	Tlogomulyo	27.03	2,447.35	328.19	51.11	-	-	2,853.68
9	Bejen	1,212.44	1,804.12	1,788.04	1,223.06	-	573.64	6,601.30
10	Candiroto	937.91	3,199.71	828.12	386.45	-	411.63	5,763.82
11	Gemawang	1,202.28	2.20	2,708.91	3,129.66	-	523.34	7,566.39
12	Jumo	1,982.51	742.65	28.58	-	-	372.40	3,126.14
13	Kaloran	279.63	3,412.00	1,336.41	-	722.64	798.03	6,548.71
14	Kandangan	2,735.35	2,537.66	1,215.83	-	-	696.91	7,185.75
15	Kedu	1,489.28	712.66	946.36	-	-	620.94	3,769.24
16	Kranggan	-	-	2,288.98	69.93	1,991.28	855.79	5,205.98
17	Pringsurat	-	13.88	3,282.69	1,458.40	0.04	1,375.21	6,130.22
18	Temanggung	912.33	1,432.36	-	-	-	980.15	3,324.84
19	Tretep	-	-	2,800.32	828.99	-	93.90	3,723.21
20	Wonobojo	-	-	4,008.03	-	-	256.97	4,265.00
TOTAL		8,607.02	26,307.91	4,471.22	7,566.50	2,713.96	7,558.91	87,225.52

Sumber: Inventarisasi Kekritisn Lahan TA 2017 Kab. Temanggung

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Temanggung memiliki luas lahan tidak kritis sebesar 8,607.2 Ha, lahan potensial kritis sebesar 26,307.91 Ha, lahan agak kritis sebesar 4,471.22 Ha, lahan kritis sebesar 7,566.5 Ha dan lahan sangat kritis sebesar 2,713.96 Ha. Untuk mengetahui capaian proporsi luasan lahan kritis di Kabupaten Temanggung yang diupayakan penanganannya digunakan formulasi perhitungan luas lahan kritis tertangani dibagi total luas lahan kritis di Kabupaten Temanggung kali 100%.

Tabel 2.22
Capaian Proporsi Luas Lahan Kritis
Terhadap Total Luas Lahan Temanggung Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi Luas Lahan Kritis tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	%	Na	0,17	0,17	0,10	1,75	0,52

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Lahan Kritis yang diupayakan Penanganannya	Ha	Na	Na	12,89	12,89	180,275	53,220
Luas Lahan Kritis	Ha	Na	Na	7.566,5	7.566,5	10.280,46	10.280,46

g. Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang menjadi target capaian adalah Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik terhadap Ibu Kota Kecamatan (IKK). Sebagai Landasan Hukum menggunakan dasar sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011- 2031
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan .
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Formulasi perhitungan Cakupan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH) menggunakan rumus Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dibagi dengan 20% Luas IKK yang mempunyai Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Kabupaten Temanggung sampai tahun 2023 sebesar 79.628,31 M2. Capaian Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik dari tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.23
Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Cakupan RTH Publik	1,08	1,10	1,10	1,10	1,10	1.10

Capaian Cakupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik tahun 2023 sebesar 1,10 dengan perhitungan jumlah RTH Publik (79.628,31 M2) dan 20% Luas IKK yang mempunyai RTH (72.341,03 M2) sehingga diperoleh hasil 1,10. Faktor pendorong capaian tersebut karena responsibilitas masyarakat terhadap RTH Publik, sedangkan faktor penghambatnya antara lain :

1. Keterbatasan lahan RTH
2. Keterbatasan anggaran untuk penyediaan RTH Publik / taman
3. Pengelolaan dan penataan terbatas
4. Jumlah SDM yang terbatas.

Untuk rekomendasi dan tindak lanjut dari indikator cakupan ruang terbuka hijau (RTH) publik dengan pengelolaan RTH Publik yang sudah ada.

h. Persentase Usaha yang Memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 wajib membuat rincian teknis limbah B3 sehingga dapat diketahui persentase usaha yang memiliki persetujuan teknis pengelolaan limbah B3, dengan formulasi perhitungan menggunakan jumlah kajian terhadap rincian teknis Limbah B3 dibagi jumlah rincian teknis Limbah B3 yang diajukan dikali 100%. Sebagai landasan hukumnya adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
- b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 95/Menlhk/Setjen/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH.

Rekomendasi izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dikeluarkan sejak tahun 2019 setelah adanya PermenLHK Nomor 95/Menlhk/Setjen/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terintegrasi dengan izin lingkungan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, sebelum tahun 2019 DPRKPLH Kabupaten Temanggung langsung menerbitkan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3), sedangkan mulai tahun 2019 DPRKPLH Kabupaten Temanggung mengeluarkan rekomendasi izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3). Jumlah permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.24
 Persentase Rekomendasi Izin Penyimpanan
 Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
 (LB3) Tahun 2018-2020

No	Tahun	Capaian Tahun		
		2018	2019	2020
1	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	1	4	3
2	Jumlah Permohonan Izin Penyimpanan LB3 yang diajukan	7	6	6
3	Capaian (%)	14,29	66,67	50,00

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah rekomendasi izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang dikeluarkan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan jumlah permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Dari data di atas perkembangan capaian cenderung fluktuatif dengan capaian tertinggi yaitu tahun

2019 dari 6 permohonan izin yang diajukan sebanyak 4 rekomendasi dikeluarkan dengan persentase sebesar 66,67%, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 6 permohonan izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) yang diajukan sebanyak 3 rekomendasi yang dikeluarkan dengan persentase sebesar 50,00% sehingga capaian tahun 2020 lebih rendah dari capaian tahun 2019.

Karena diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH tahun 2021 maka indikator tentang pengelolaan limbah B3 berubah menjadi Persentase Usaha yang Memiliki Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3. Untuk capaian tersebut di atas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.25
Persentase Kajian Teknis Penyimpanan Limbah B3

No	Tahun	Jumlah kajian terhadap rincian teknis Limbah B3	Jumlah rincian teknis Limbah B3 yang diajukan	Capaian (%)	Keterangan
1	2021	0	0	0	
2	2022	1	1	100	Rencana pembangunan RSIA Hendrata Mulia
3	2023	1	1	100	RS Kristen Ngesti Waluyo

i. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 72, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Formulasi yang digunakan dalam perhitungan persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup :

$$\frac{\text{Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan}}{\text{Target Usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan}} \times 100 \%$$

Tabel 2.26
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang Memiliki Izin

No	Tahun	Capaian Tahun		
		2018	2019	2020
1	Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	78	52	20
2	Jumlah usaha/kegiatan yang memiliki izin Lingkungan dan Izin PPLH	116	125	136
3	Capaian (%)	67,24	41,60	14,71

Tabel 2.27
Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

No	Tahun	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023
1	Jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan	50	50	0
2	Target usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan	50	50	0
3	Capaian (%)	100	100	0

Dari tabel di atas dapat diketahui persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan/usaha yang dilakukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Capaian kinerja mulai tahun 2018 sampai tahun 2020 cenderung fluktuatif, sedangkan capaian terendah yaitu pada tahun

2020 hal ini disebabkan karena anggaran untuk pengawasan kegiatan/usaha dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Temanggung sehingga dari 136 kegiatan/usaha yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH hanya terlaksana pembinaan dan pengawasan sebanyak 20 kegiatan/usaha dengan persentase sebesar 14,71%. Pada tahun 2021 sebanyak 50 kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dari target yang ditetapkan sebanyak 50 kegiatan dan/atau usaha dengan persentase sebesar 100 persen.

Pada Tahun 2022 sebanyak 50 kegiatan dan/atau usaha yang sudah dilakukan pembinaan dan pengawasan dari target yang ditetapkan sebanyak 50 kegiatan dan/atau usaha. Dengan adanya Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Pengendali Dampak Lingkungan di DPRKPLH Kabupaten Temanggung akan lebih memaksimalkan hasil dari kegiatan pengawasan dan pembinaan usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Temanggung.

Pada tahun 2023 target kegiatan pembinaan dan pengawasan penataan lingkungan di Kabupaten Temanggung sebanyak 50 kegiatan dan/atau usaha, akan tetapi sampai dengan triwulan I tahun 2023 belum ada kegiatan dan/atau usaha yang dilakukan pembinaan dan pengawasan penataan lingkungan karena berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan akan dimulai pada bulan Juni 2023.

j. Cakupan Sekolah Berwawasan Lingkungan

Sekolah Berwawasan Lingkungan adalah sekolah yang mengikuti program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Program Adiwiyata/sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan) yang menitikberatkan adanya perubahan perilaku warga sekolah untuk ikut dalam mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran (warga sekolah) dalam pelestarian Lingkungan Hidup melalui kegiatan-kegiatan dan aktifitas kegiatan belajar mengajar (KBM) sehingga diharapkan keterlibatan warga

sekolah meningkat (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi) serta ikut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH).

Sebagai Dasar Hukumnya adalah

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/9/2019 Tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah

Formulasi perhitungan jumlah sekolah yang mendapat predikat Adiwiyata sampai dengan tahun ini dibagi total sekolah di Kab. Temanggung (750 sekolah) dikali 100%. Cakupan sekolah berwawasan lingkungan adalah jumlah Sekolah Adiwiyata Kabupaten Temanggung dari seluruh sekolah di Kabupaten Temanggung tingkat SD/MI, SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta sebanyak 750 sekolah. Jumlah sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata (Sekolah berbudaya dan berwawasan lingkungan Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.28
Daftar Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung

Indikator Kinerja	Capaian s.d Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Sekolah Adiwiyata	183	193	193	205	209	209

Indikator Kinerja	Capaian s.d Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Sekolah di Kabupaten Temanggung	744	744	744	750	750	750
Persentase (%)	24,60	26,48	26,48	27,33	27,87	27,87

Berdasarkan tabel di atas sampai triwulan I tahun 2023 capaian indikator cakupan sekolah berwawasan lingkungan masih sama dengan tahun 2022 yaitu sebesar 27,87%. Faktor pendorong capaian indikator ini diantaranya sinergitas antara DPRKPLH dengan instansi terkait serta Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan sekolah yang berwawasan lingkungan selain itu Sekolah Adiwiyata juga melaksanakan pembinaan terhadap sekolah lain dalam upaya mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan.

Faktor penghambat antara lain rendahnya minat sebagian sekolah di Kabupaten Temanggung untuk mengikuti Program Sekolah Adiwiyata sehingga dalam upaya meningkatkan capaian indikator ini dengan mendorong dan memaksimalkan potensi Sekolah di Kabupaten Temanggung untuk menjadi Sekolah Adiwiyata.

k. Persentase Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup

Dalam Pasal 63 huruf w Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa dibidang Lingkungan hidup.

Penghargaan lingkungan hidup yang sudah diraih yaitu sekolah berwawasan lingkungan tingkat Asean, Mandiri, Nasional dan Provinsi, Kalpataru (Kelompok masyarakat/Kelompok tani/KTH) yang secara berkelanjutan melakukan kegiatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan, Proklamasi (RW/Kelurahan) yang telah melakukan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi terkait dengan perubahan iklim dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.29
Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang diusulkan

Indikator Kinerja	Capaian s.d Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah yang mendapatkan penghargaan	-	-	-	14	11	1
Jumlah usulan penghargaan yang diusulkan tiap tahun	-	-	-	17	13	9
Persentase (%)	-	-	-	82,35	84,62	11,11

Keterangan:

Jumlah usulan penghargaan bidang lingkungan hidup yang diusulkan tiap tahun berdasarkan data pengusulan rata-rata tiap tahun, sebagai berikut:

- Adipura	1 usulan/tahun
- Adiwiyata	5 usulan/tahun
- Kalpataru	1 usulan/tahun
- Proklam	1 usulan/tahun
- Lomba Habitat	<u>1 usulan/tahun</u>
TOTAL	9 usulan/tahun

$$\text{Presentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup} = \frac{\sum \text{yang mendapatkan penghargaan}}{\sum \text{usulan yang diusulkan (9 usulan)}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel di atas capaian tahun 2023 triwulan I realisasi penghargaan dalam bidang lingkungan hidup sebanyak 1 penghargaan yaitu juara harapan I Lomba Habitat tingkat Provinsi untuk Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo.

1. Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti

Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti, Berdasarkan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1 /3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.

Formulasi perhitungan : jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikalikan 100%.

Tabel 2.30
Capaian Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja	Capaian Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	14	15	7	12	14	1
Jumlah pengaduan yang masuk	14	15	7	12	14	1
Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan setiap tahun terkait data pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 setiap aduan yang masuk seluruhnya dapat diselesaikan sehingga capaian persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjut sebesar 100%. Jumlah kasus lingkungan yang ditindaklanjuti dari seluruh jumlah pengaduan yang masuk dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 cenderung fluktuatif.

Faktor pendorong dalam upaya penyelesaian kasus aduan lingkungan antara lain adanya koordinasi antar SKPD terkait dalam penyelesaian aduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung, sedangkan faktor penghambatnya kurangnya kesadaran sebagian masyarakat, pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan regulasi yang ada. Rekomendasi dan tindak lanjut dalam

upaya meminimalisir terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup adalah memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan agar meminimalisir dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

m. Persentase Sampah Tertangani

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, definisi dari timbunan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktifitas dalam kurun waktu tertentu dihitung berdasarkan satuan berat (kilogram) atau volume (liter). Kebijakan pengelolaan sampah dalam Perda di atas meliputi 2 (hal), yaitu:

- a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pembatasan timbunan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali,
- b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.

Definisi pengelolaan sampah baik kegiatan pengurangan dan penanganan dibatasi dengan definisi yang tercantum pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Temanggung dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menyebutkan bahwa :

- a. Pengurangan Sampah (*waste minimization*) adalah kegiatan pengelolaan sampah yang terdiri dari

pembatasan terjadinya sampah, guna ulang dan daur ulang yang dilakukan oleh masyarakat;

- b. Penanganan sampah (*waste handling*) adalah kegiatan pengelolaan sampah yang terdiri dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang dilakukan oleh pemerintah.

Secara umum timbulan sampah dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti permukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya. Pengelolaan sampah dilakukan oleh penghasil sampah atau sumber sampah yaitu masyarakat melalui bank sampah dan TPS atau TPS 3R. Sampah terpilah menjadi 3 jenis sampah yaitu sampah organik, non organik dan residu. Sampah organik dapat dikompos menjadi pupuk organik atau kompos maupun untuk budidaya maggot BSF yang saat ini banyak dikembangkan, sampah an organik dapat dikelola menjadi kerajinan, souvenir, maupun wadah yang menarik sebagai pengganti plastik belanja dan lain-lain. Sisa pemilahan atau residu dari sumber sampah diwadahi pada depo transfer atau *container* sampah untuk diangkut atau ditangani di TPA. Secara ideal pengelolaan sampah seperti yang disebutkan di atas, akan tetapi fakta dilapangan sebagian besar masyarakat dalam pengelolaan sampah masih berpola kumpul angkut dan buang, serta belum melakukan pilah, kumpul dan manfaatkan serta yang diskumpulkan di TPS/TPA adalah sampah residu.

Pengelolaan sampah yang telah dilakukan terdiri dari :

1. Pengurangan sampah

Pengurangan yang tercatat yaitu hasil dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat melalui kegiatan bank sampah.

2. Penanganan sampah

- a. Persentase sampah tertangani di Sumber

yang dimaksud dengan timbulan sampah yang

tertangani di sumber adalah jumlah yang ditangani melalui rumah tangga, tempat Pengelolaan Sampah sistem 3R terhadap jumlah timbulan sampah yang dihasilkan.

b. Persentase sampah tertangani di TPA

Pengelolaan sampah di TPA meliputi pengangkutan sampah, pemilahan dan pengomposan, pemrosesan sampah pada sel sampah (penataan, pemadatan penutupan pelapis antara dan penutupan blok/sel sampah), penangkapan dan pemanfaatan gas metan, pengelolaan lindi.

Pengangkutan sampah yang dihasilkan dilaksanakan oleh pemda (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Dinas Perindagkop UMKM), swasta, mandiri dari sumber langsung ke TPA.

Rumus Persentase **sampah tertangani** adalah jumlah sampah tertangani dibagi jumlah timbulan sampah dikali 100%.

c. Persentase pengangkutan sampah di kabupaten adalah persentase jumlah timbulan sampah yang di layani melalui kegiatan pengangkutan terhadap total timbulan sampah yang dihasilkan.

d. Persentase Pengoperasian TPA

Persentase pengoperasionalan TPA adalah frekuensi penutupan sel sampah, kualitas pengolahan lindi, dan penanganan gas metan.

Tabel 2.31
Capaian Pengelolaan Sampah
di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

No	Uraian	Capaian s.d Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Pengurangan sampah							
	1.	Jumlah Pengurangan Sampah (ton/tahun)	7,77	7,22	164,00	18.306,20	40.499,26	10.840,67
		a. Pengelolaan sampah di Rumah Tangga					29.210,07	7993,65
		b. Bank Sampah (Ton/tahun)	6,77	7,22	164,00	49,90	45,19	7,13
		c. TPSD (Ton/tahun)		-	-	18.256,30	6.534,27	1669,09
		d. TPS3R					4.709,73	1170,8
	2.	Persentase Pengurangan Sampah (%)			0,09	10,03	27,73	29,83
2	Penanganan sampah							
	1.	Jumlah sampah tertangani (Ton/tahun)	141,8	154,74	43.839,9 7	40.112,11	45.764,61	10.719,38
		a. Jumlah sampah terkelola di TPS 3R/Depo Transfer (Ton/tahun)	64,72	71,49	8.689,15	1.887,63	2.062,85	518,25
		b. Jumlah sampah tertangani di TPA (Ton)	77,08	83,25	35.150,8 2	38.224,48	43.701,76	10.201,12
	2.	a. Jumlah Timbulan sampah (Ton)/hari	486,78	490,92	497,64	500,17	400,17	403,72
		b. Jumlah Timbulan sampah (Ton)/tahun	175.241	176.731	181.640, 08	182.562,96	146.050,37	36.335
	3.	Presentase Penanganan Sampah (%)	30,52	32,99	24,23	21,97	31,33	29,5
3	Pengelolaan Sampah							
	1.	Persentase Pengelolaan Sampah (%)			24,32	32	59,06	59,34

Timbulan sampah terkelola di Kabupaten Temanggung pada Triwulan I Tahun 2023 sebesar 59,34% yang terdiri dari persentase pengurangan sampah sebesar 29,83% dan persentase penanganan sampah sebesar 29,50% atau 21.560,05 ton. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 capaian tahun 2023 mengalami kenaikan, yang disebabkan oleh penambahan jumlah cakupan pelayanan persampahan.

Pengelolaan sampah yang intensif baik melalui TPS 3R maupun bank sampah yang mana pengelolaan melalui bank sampah yang relatif sudah baik, akan tetapi kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya masih memerlukan kerja keras

untuk mencapai target-target yang telah ditentukan.

Penanganan sampah di TPA yang mencakup 10.201 ton mencapai rata-rata berkisar 28,075% dari total timbulan sampah. Secara umum penanganan sampah di TPA ke depan diharapkan semakin berkurang, dan lebih banyak penanganan pada sumbernya, TPS 3R, bank sampah atau penanganan lainnya. Secara umum pemrosesan sampah di TPA meliputi pemilahan sampah plastik dan sampah organik yang berupa daun untuk dikompos, sementara penanganan gas metan masih rendah.

n. Cakupan Pelayanan Persampahan

Pelayanan persampahan didefinisikan sebagai pelayanan persampahan dan kebersihan yang meliputi:

- a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPS/TPS3R/TPSD atau TPA secara berkelanjutan
- b. Pengangkutan sampah dari lokasi penampungan sementara (TPS/TPS3R/TPSD) ke lokasi TPA secara berkelanjutan
- c. Pemrosesan akhir sampah di TPA.

Pelayanan persampahan meliputi pelayanan persampahan dan kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta.

Persentase Pelayanan Persampahan merupakan persentase daerah atau desa dan kelurahan yang dijangkau pelayanan persampahan melalui Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta.

Rumus **perhitungan** cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Temanggung adalah jumlah desa/kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan melalui Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta terhadap jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung. Capaian Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.32
Capaian Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2018-2023

No	Uraian	Capaian s.d Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan	88	136	131	155	177	179
	- Jumlah desa dan kelurahan terlayani swasta/mandiri	5	6	18	27	36	36
	- Jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda	83	130	113	128	141	143
2	Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Temanggung	289	289	289	289	289	289
3	Persentase (%)	30,44	47,06	45,33	53,63	61,25	61,94

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda sebanyak 143 desa/kelurahan dan swasta/mandiri sebanyak 36 desa/kelurahan, sehingga total sebanyak 179 desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung yang mendapat pelayanan persampahan atau sebesar 61,94% dari total jumlah desa/kelurahan.

Kondisi Cakupan Pelayanan Persampahan tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 sebagai berikut:

1. Jumlah desa dan kelurahan terlayani swasta/mandiri tidak ada kenaikan yaitu tetap berjumlah 36 desa/kelurahan,
2. Jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda naik sebesar 2 (dua) desa,
3. Secara keseluruhan terjadi kenaikan sebanyak 2 (dua) desa.

o. Tersedianya fasilitas sarana prasarana pengelolaan persampahan yang memadai

Fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam pengelolaan persampahan meliputi pewadahan, pengangkutan, pemindahan (depo transfer) sebelum sampah diangkut dan dikelola di TPA. Pewadahan sampah bisa menggunakan barang-barang berupa tong sampah, bak sampah, atau kantong-kantong sampah.

Pengangkutan diperlukan becak sampah atau roda tiga, mobil pick up, dump truck, arm roll truck.

Tabel 2.33
Daftar Depo Transfer Tahun 2023

No	Nama Barang	Ukuran Bangunan	Luas Tanah	Jumlah	Lokasi	Kondisi
1	Depo Transfer Parakan Kauman	7 m x 7 m	21 m x 10 m	1 unit	Parakan Kauman	Bangunan Permanen
2	Depo Transfer Seklontong	2 m x 4 m	7 m x 10 m	1 Unit	Temanggung II	Semi Permanen
3	Depo Transfer Banyuurip	4 m x 5 m	7 m x 10 m	1 Unit	Banyuurip	Bangunan Permanen
4	Depo Transfer Jampirejo	2 m x 4 m	7 m x 5 m	1 Unit	Jampirejo	Semi Permanen

Tabel 2.34
Daftar TPS 3R Kabupaten Temanggung

NO	LOKASI	KECAMATAN	ANGGARAN	TAHUN PEMBANGUNAN	KSM/PENGELOLA
1	TPS3R Kebonsari	Temanggung	APBN	2012	Kembangasri
2	TPS3R Madureso	Temanggung	APBN	2015	Madu Asri
3	TPS3R Nguwet	Kranggan	APBN	2015	Usaha Mandiri
4	TPS3R Morobongo	Jumo	APBD	2015	Indah Lestari
5	TPS3R Parakan Kauman	Parakan	APBD	2016	Parakan Kauman
6	TPS3R Muntung	Candiroto	APBN	2017	Saras Sejahtera
7	TPS3R Selopampang	Selopampang	APBN	2018	Seloyudho Makmur
8	TPS3R Menggoro	Tembarak	APBN	2018	Goro Makmur
9	TPS3R Kedu	Kedu	APBN	2018	Kedu Gumilar
10	TPS3R Kledung	Kledung	APBN	2018	Kledung Sido Asri
11	TPS3R Gondosuli	Bulu	APBN	2019	Resik Makmur
12	TPS3R Kundisari	Kedu	APBN	2019	Kebon Agung
13	TPS3R Mudal	Temanggung	APBD	2019	
14	TPS3R Mondoretno	Bulu	APBD PROV	2020	Almond
15	TPS3R Jlegong	Bejen	APBN	2020	Jlegong Lestari
16	TPS 3R Traji	Parakan	DAK	2021	
17	TPS 3R Sriwungu	Tlogomulyo	APBN	2021	
18	TPS 3R Purbosari	Ngadirejo	APBN	2021	
19	TPS 3R Balesari	Bansari	APBN	2021	
20	TPS 3R Walitelon Utara	Temanggung	KOTAKU	2021	
21	TPS 3R Parakan Kauman	Parakan	KOTAKU	2021	
22	TPS 3R Parakan Wetan	Parakan	KOTAKU	2021	
23	TPS 3R Pandemulyo	Bulu	APBN	2022	
24	TPS 3R Losari	Tlogomulyo	APBN	2022	
25	TPS 3R Kranggan	Kranggan	DAK	2022	

NO	LOKASI	KECAMATAN	ANGGARAN	TAHUN PEMBANGUNAN	KSM/PENGELOLA
26	TPS 3R Keblukan	Kaloran	DAK	2022	
27	TPS 3R Bandunggede	Kedu	DAK	2022	
28	TPS 3R Mangunsari	Ngadirejo	DAK	2022	

Tabel 2.35
Daftar Inventarisasi Aset Sarana Persampahan
Kabupaten Temanggung

No	Peralatan	Jumlah Aset s.d Tahun						Satuan	Kondisi
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Alat Berat	7	7	7	7	7	7	Unit	2 Rusak Berat
2	Dump Truck	16	17	17	17	17	17	Unit	8 Rusak Berat
3	Truck Arm Roll	6	7	7	11	11	11	Unit	Baik, (3 Milik Dindagkop, 4 pengadaan 2021)
4	Pick Up	8	9	9	9	9	9	Unit	4 Rusak Berat
5	Sepeda Motor	2	2	2	2	2	2	Unit	Baik
6	Sepeda Motor Roda 3	27	27	29	34	34	34	Unit	7 Rusak Berat
	o Roda 3 Kecamatan Temanggung (DPRKPLH)		14	14	18	18	18		
	o Roda 3 TPS 3R/Parakan dan Ngadirejo/ TPA		6	6	7	7	7		
	o Roda 3 Cadangan	2	6	8	4	1	1		
	o Roda 3 Rusak Berat	1	1	1	5	7	7		
7	Gerobak Sampah	55	55	59	59	59	59	Unit	48 rusak berat
	a. Gerobak Sampah TPS 3R/Parakan dan Ngadirejo/TPA			10	10	10	10		
	b. Gerobak Sampah Cadangan			4	4	4	4		
	c. Gerobak Sampah Temanggung		29	29	29	29	29		
	d. Gerobak Sampah Selain di TP3R, TPA dan Temanggung (Kranggan 3, Bulu 2, Kedu 1, Jumo 1 dan Tembarak 1)	4	7	8	8	8	8		
e. Gerobak Sampah Rusak Berat	n/a	n/a	n/a	8	8	8			
8	Kontainer Sampah	27	27	28	28	33	32	Buah	
	a. Kontainer TPS 3R	3	3	5	5	6	6		
	b. Kontainer Armroll			4	4	7	7		

No	Peralatan	Jumlah Aset s.d Tahun						Satuan	Kondisi
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	c. Kontainer Depo Transfer	5	5	5	5	4	4		
	d. Kontainer Lainnya			6	6	9	9		
	e. Kontainer Rusak Berat	n/a	n/a	1	1	1			
	f. Kontainer Pasar	n/a	n/a	7	7	7	7		Milik Dinperindagkop
9	Tangki IPLT	n/a	-	2	2	2		Unit	Baik

Tabel 2.36
Daftar Alat Pengolah Sampah
di TPA Sangrahan Kabupaten Temanggung

No	Peralatan	Jumlah Aset		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi
		Tahun 2015*/2018**	Desember Tahun 2020				
1	Excavator	2*	-	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1 Rusak Berat
2	Buldozer	-	-	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Baik
3	Mesin Pencacah (Kompos/Organik)	4**	-	5 Unit	5 Unit	5 Unit	Rusak Ringan
4	Mesin Pirolisis	1	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Baik
5	Mesin Pencacah An Organik /Plastik	1	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rusak Berat
6	Mesin Press Plastik	1	-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Baik
7	Jembatan Timbang	-	1	1 Unit	1 Unit	1 Unit	Rusak/dalam perbaikan

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun pada sisi yang lain masih ada indikator yang belum mencapai target sehingga memerlukan upaya keras dan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung dari 24 indikator sasaran dan indikator program terdapat 6 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Hal ini disebabkan karena Pengujian kualitas air maupun udara belum dilaksanakan pada triwulan I tahun 2023 sehingga masih menggunakan data tahun 2022 selain itu hasil pengujian kualitas udara belum mencapai target yang telah ditetapkan

- b. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)**

Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran sehingga pendanaan masih bertumpu dari sumber dana Bankeu Prov dan APBN

- c. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup**

Hal ini disebabkan karena proses permohonan persetujuan Amdal baru diproses, tahapan baru sampai pada verifikasi teknis dokumen KA Amdal, Andal RKL RPL di DLHK Provinsi Jateng

- d. Indeks Kualitas Udara**

Hal ini disebabkan karena pengujian kualitas udara secara serentak akan dilaksanakan pada akhir bulan Juni dan akan selesai pada bulan Juli 2023 sehingga capaian triwulan I 2023 data masih menggunakan realisasi tahun 2022

- e. Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup**

Hal ini disebabkan karena sampai dengan triwulan I tahun 2023 belum dilaksanakan monev terhadap kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung

- f. Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup**

Hal ini disebabkan karena Informasi terkait dengan penghargaan sebagian besar diumumkan pada akhir tahun serta ada beberapa penghargaan yang tidak diselenggarakan tiap tahun

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRKPLH Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 2.37
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Sumber daya yang belum mencukupi dan mumpuni	<ul style="list-style-type: none"> - Kekurangan SDM dan sarana prasarana pendukung - SDM dan sarpras tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran dan SDM - SDM dan sarpras tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi
2.	Data pokok pembangunan	Data pokok dari bidang dan UPT belum tersaji dengan baik <i>dan update</i>	Kurang peduli nya SDM akan pentingnya data pokok
3.	Ketersediaan data rumah yang valid dan akurat	Ketersediaan data rumah yang tidak <i>update</i>	Perangkat daerah/ instansi vertikal (BPS) tidak menerbitkan data rumah, diperlukan adanya Perangkat Daerah yang sah untuk menetapkan data rumah
4.	Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang profesional	Pemanfaatan hunian sewa yang dilaksanakan oleh UPT Rusunawa yang belum maksimal	Kurangnya jumlah personil pengelola dan belum lengkapnya peraturan pengelolaan/ sewa Rusunawa
5.	Data DTKS belum mewakili data rumah tidak layak huni karena di luar data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) masih banyak warga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan penanganan rumah tidak layak huni (RTLH)	Masih ada data warga MBR yang belum masuk DTKS	<i>Update</i> data yang melibatkan peran perangkat tingkat bawah (RT/RW)
6.	Data PSU	Data PSU di Kabupaten Temanggung belum tersaji dengan valid	PSU di perumahan yang lama belum terdata dan diserahkan ke Pemda
7.	Makam	<ul style="list-style-type: none"> - Data makam milik pemerintah, masyarakat dan organisasi/swasta belum valid - Makam non muslim belum terkelola dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengampu makam belum terorganisasi dengan baik - Belum adanya tempat untuk pengabuan dan penyimpanan abu

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
8.	Sengketa tanah	Data pertanahan antara masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan ormas belum valid	Data pertanahan antara masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan ormas belum valid
9.	Pelayanan persetujuan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha belum terbiasa dengan penerapan regulasi baru dalam perizinan berusaha - Kewenangan perizinan tidak hanya di Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi baru belum tersosialisasikan secara menyeluruh baik pada pelaku usaha maupun PD Teknis - Sistem OSS yang belum sempurna dan belum terintegrasi dengan sistem manajemen informasi lingkungan hidup
10.	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Belum semua Bank Sampah unit di Kabupaten Temanggung terdata	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak Bank Sampah yang belum memiliki SK pendirian Bank Sampah - Masih banyak Bank Sampah yang tidak melaporkan kegiatan
11.	Belum semua sekolah di Kabupaten Temanggung berpredikat Sekolah Adiwiyata	Kurangnya SDM untuk mengampu kegiatan adiwiyata di sekolah serta keterbatasan anggaran sekolah untuk menjalankan program adiwiyata	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran sekolah –sekolah tentang gerakan perilaku Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah - Keterbatasan anggaran untuk fasilitasi kegiatan Adiwiyata
12.	Pemeliharaan dan penataan aset RTH yang belum optimal	Kurang optimalnya pengelolaan di beberapa RTH	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan pertamanan - Kurangnya sarana prasarana dalam pengelolaan pertamanan
13.	Data RTH Perkotaan (Publik dan Privat) belum ada	Belum dilakukan inventarisasi data RTH Privat	Adanya peraturan baru terkait RTH

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
14.	Bertambahnya luas lahan kritis	<ul style="list-style-type: none"> - Sedimentasi di aliran sungai - menurunnya kualitas lahan - menurunnya debit pada sumber mata air 	Pengelolaan lahan yang kurang memperhatikan aspek konservasi tanah
15.	Pencemaran air dan udara	Belum optimalnya usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Ketaatan usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat terhadap upaya pengendalian sumber – sumber pencemaran belum maksimal
16.	Pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan - Pengurangan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampah belum terkelola secara maksimal - Kurangnya SDM dan sarpras pengelolaan sampah
17.	Pelayanan persampahan	Sarana prasarana dan sumber daya manusia	Kurangnya sdm dan sarpras pelayanan persampahan
18.	Operasional TPA	Penataan sampah dengan control landfill	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak tersedianya anggaran pengadaan tanah urug untuk penataan sampah; - Kondisi Alat berat yang sudah tidak maksimal; - Sampah yang masuk ke TPA belum terkelola secara maksimal
19.	Zona aktif yang tersedia di TPA sudah mencapai kapasitas maksimal	<ul style="list-style-type: none"> - Volume sampah yang masuk ke TPA terus meningkat - Masih tersedia lahan yang belum terbangun zona aktif 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampah yang masuk ke TPA kurang terkelola dengan maksimal - Penambahan area pelayanan persampahan - Terbatasnya anggaran dalam pembangunan zona aktif
20.	Pengelolaan IPLT	Kurangnya SDM dan sarpras pendukung	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya regulasi yang mengatur retribusi - Kurang optimalnya sarpras unit IPLT - SDM yang terbatas

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			- Tidak tersedianya alokasi biaya operasional pengolahan IPLT
21.	Pelayanan pengujian kualitas lingkungan yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tercukupi sumber daya manusia yang ada; - Proses permohonan akreditasi yang belum terlaksana - Pemenuhan kompetensi SDM yang ada belum tercukupi - Uji profisiensi belum terlaksana untuk parameter yang diajukan akreditasi - Penerapan dokumen sistem mutu yang belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber daya manusia belum terpenuhi - Belum adanya anggaran untuk memenuhi proses permohonan akreditasi, pemenuhan kompetensi, verifikasi metode, uji profisiensi, serta biaya assesment akreditasi - -

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel di atas maka isu strategis DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- 1) Perumahan
 - a. Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni;
 - b. Pengurangan backlog perumahan;
 - c. Pengelolaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang professional.
- 2) Permukiman
 - a. Pengurangan kawasan kumuh perkotaan;
 - b. Peningkatan kawasan perumahan dan permukiman layak huni;
 - c. Peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan akses sanitasi layak.
- 3) Persampahan
 - a. Peningkatan pengurangan sampah dari sumbernya;
 - b. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan persampahan;
 - c. Peningkatan pengelolaan persampahan;
 - d. Peningkatan kualitas dan jumlah prasarana & sarana persampahan;
 - e. Daya tampung TPA yang ada sudah *overload*.

- 4) Lahan Kritis
 - a. Pengurangan lahan kritis melalui konservasi tanah dan air secara berkelanjutan;
 - b. Laju erosi yang berdampak pada penurunan produktifitas lahan;
 - c. Edukasi tentang pengelolaan lahan kepada masyarakat sesuai dengan kaidah konservasi.
- 5) Ketersediaan Air
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas air (permukaan, tanah, dll);
 - b. Pelestarian sumber mata air.
- 6) RTH Perkotaan (Pertamanan)
 - a. Terbatasnya SDM pengelolaan RTH;
 - b. Terbatasnya sarpras pemeliharaan pertamanan;
 - c. Inventarisasi data RTH Privat.
- 7) Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup (kualitas air maupun udara);
 - b. Peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup bagi masyarakat dan usaha/kegiatan untuk kelestarian lingkungan hidup;
 - c. Ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana laboratorium untuk pemenuhan laboratorium terakreditasi dan laboratorium teregistrasi KLHK.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal DPRKPLH Kabupaten Temanggung sejumlah 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD hal ini disebabkan karena untuk menindaklanjuti Surat Edaran Kemendagri Nomor 660.1/5113/Bangda tanggal 6 juli 2022 tentang

pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam rangka penyusunan RPJPD dan RPJMD

2. Terdapat usulan penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan berdasarkan analisa kebutuhan pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut:
 - a. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus untuk memenuhi kekurangan SDM
 - b. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU untuk tindaklanjut dari Perda Perumahan (RP3KP) sebagai syarat usulan pendanaan APBN/DAK dan penambahan output penyusunan Dokumen RPKPKPK sebagai syarat usulan pendanaan APBN
 - c. Inventarisasi sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebagai tindaklanjut Perpres 7 Tahun 2021 (PPTPKH)
 - d. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebagai tindaklanjut Perpres 7 Tahun 2021 (PPTPKH)
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor untuk memenuhi kebutuhan terkait penerangan bangunan kantor
 - f. Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten /Kota untuk Dasar pembuatan analisis Daya Tampung dan Daya Dukung sebagai dasar penyusunan Dokumen anatara lain RPJMD, RTRW dll
 - g. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota untuk memenuhi ketentuan dalam melaksanakan validasi terhadap uji analisis air, udara dan pengolahan limbah B3 membutuhkan laboratorium terakreditasi dan teregistrasi
 - h. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup untuk Memfasilitasi sarana dan prasarana dalam kegiatan sekolah Adiwiyata (tempat sampah, biopori, tanaman)
 - i. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota untuk memenuhi kebutuhan operasional persampahan

- j. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota sebagai upaya tindaklanjut pembangunan dan operasional TPA baru yang berbasis TPST.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.38 berikut:

Tabel 2.38
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD 2024

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				
		Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
	PENDAPATAN					2.329.080.000
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan					1.200.000.000
	Sewa Rusunawa					1.129.080.000
	BELANJA					41.278.719.556
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					14.542.100.000
1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					5.685.000.000
1 3 4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					685.000.000
1 3 4 2 0 1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					685.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2024				Keterangan
		Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
PENDAPATAN					2.329.080.000	
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan					1.200.000.000	
Sewa Rusunawa					1.129.080.000	
BELANJA					48.284.119.556	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					14.756.800.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					5.685.000.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					685.000.000	
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota					685.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024					Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1 3 4 0 3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS					685.000.000	
1 3 4 2 3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Kelurahan Kebonsari Kecamatan Temanggung		Terbangunannya gedung sampah anorganik dan tempat Magot	1 unit gedung sampah Volume 9 x 12 M2 tanpa dinding full	200.000.000	Hasil Musrenbang
		Desa Blimbing Kecamatan Kandangan		Terlaksananya pengembangan TPSD dan pengadaan alat pemilah	1 paket	185.000.000	Hasil Musrenbang
		Desa Pingit Kecamatan Pringsurat		Terlaksananya pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah	1 Paket	300.000.000	Hasil Musrenbang
1 3 5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)		100%	5.000.000.000	
1 3 5 2 0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000.000	
1 3 5 2 0 6	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kabupaten Temanggung		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	500 Rumah Tangga	5.000.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024					Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1 3 4 0 3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS					685.000.000	
1 3 4 2 3	Pembangunan TPA/TPST/SPA/T PS-3R/TPS	Kelurahan Kebonsari Kecamatan Temanggung		Terbangunannya gedung sampah anorganik dan tempat Magot	1 unit gedung sampah Volume 9 x 12 M2 tanpa dinding full	200.000.000	Hasil Musrenbang
		Desa Blimbing Kecamatan Kandangan		Terlaksananya pengembangan TPSD dan pengadaan alat pemilah	1 paket	185.000.000	Hasil Musrenbang
		Desa Pingit Kecamatan Pringsurat		Terlaksananya pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah	1 Paket	300.000.000	Hasil Musrenbang
1 3 5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)		100%	5.000.000.000	
1 3 5 2 0 1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota					5.000.000.000	
1 3 5 2 0 6	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kabupaten Temanggung		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	500 Rumah Tangga	5.000.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024					Pagu Indikatif
		Lokasi	Target Capaian Kinerja				
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1 0 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						8.857.100.000
1 4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		4,46%	1.186.800.000	
			Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi		87,80%		
1 4 2 0 5	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						1.186.800.000
1 4 2 0 5 2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kelurahan Kertosari, Kelurahan Parakan Wetan, Kelurahan Parakan Kauman Kelurahan Manggong, Kelurahan Kranggan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		6 Dokumen	1.186.800.000	
			Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		6 Rusunawa		
1 4 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase rumah layak huni		95,54%	7.670.300.000	
			Persentase kawasan kumuh perkotaan		5,40%		
			Persentase warga negara korban bencana yang		100%		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024					Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1 0 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						9.071.800.000
1 4 2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)		4,46%	1.201.800.000	
			Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi		87,80%		
1 4 2 0 5	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						1.201.800.000
1 4 2 0 5 2	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kelurahan Kertosari, Kelurahan Parakan Wetan, Kelurahan Parakan Kauman Kelurahan Manggong, Kelurahan Kranggan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		6 Dokumen	1.201.800.000	Penambahan upah Supporting Staf
			Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus		6 Rusunawa		
1 4 3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase rumah layak huni		95,54%	7.870.000.000	
			Persentase kawasan kumuh perkotaan		5,40%		
			Persentase warga negara korban bencana yang		100%		

Kode Rekening	Kategori Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024					Keterangan										
			Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif											
				Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan												
1	4	3	2	0	3	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU						Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 dokumen	300.300.000		Tindaklanjut dari Perda Perumahan (RP3KP) sebagai syarat usulan pendanaan APBN/DAK		
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								26.736.619.556			Penambahan output penyusunan Dokumen RPKPKPK sebagai syarat usulan pendanaan APBN	
2	1	1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								30.000.000				
2	1	1	4			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pertanahan		100%				30.000.000				
2	1	0	4	2	0	1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota							30.000.000				
2	1	0	4	2	0	1	Inventarisasi sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu)			Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu)	5 dokumen			15.000.000				
							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								33.527.319.556			
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								75.000.000			
							Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		Persentase Penyelesaian Fasilitasi Pertanahan		100%			75.000.000				
							Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota							75.000.000				
							Inventarisasi sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah			Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah	5 dokumen			50.000.000				Tindaklanjut Perpres 7 Tahun 2021 (PPTPKH)

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				
		Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
	Daerah Kabupaten/Kota		Daerah Kabupaten /Kota			
2 0 4 2 0 1	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 berita acara	15.000.000	
2 1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				26.706.619.556	
2 1 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100%	13.083.839.556	
X X 0 1 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.099.413.456	
X X 0 1 2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPRKPLH Kabupaten Temanggung	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	13 bulan	12.099.413.456	
X X 0 1 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				58.000.000	
X X 0 1 5 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	147 paket	58.000.000	
X X 0 1 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah				107.500.000	

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2024				Keterangan
		Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten /Kota			
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 berita acara	25.000.000	Tindaklanjut Perpres 7 Tahun 2021 (PPTPKH)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					33.452.319.556	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100%	13.090.339.556	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12.099.413.456	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	13 bulan	12.099.413.456	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					58.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	147 paket	58.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					114.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024					Pagu Indikatif
		Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
X X 0 2 0 1 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 kegiatan	6.500.000	
		DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan		
X X 0 2 0 6 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.000.000	
X X 0 2 0 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	22.000.000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan		
X X 0 2 0 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	20.000.000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan		
X X 0 2 0 6 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu, Fasilitasi Rapat	12 bulan	26.000.000	
X X 0 2 0 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	30.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024					Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
X X 0 2 0 1 6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 kegiatan	13.000.000	Memenuhi kebutuhan bahan penerangan gedung kantor
		DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan		
X X 0 2 0 6 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.000.000	
X X 0 2 0 6 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	22.000.000	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan		
X X 0 2 0 6 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 paket	20.000.000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan		
X X 0 2 0 6 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu, Fasilitasi Rapat	12 bulan	26.000.000	
X X 0 2 0 6 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	30.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024					Pagu Indikatif
		Lokasi	Target Capaian Kinerja				
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
X X 0 1 2 0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55.500.000	
X X 0 1 2 0 7 0 5	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket		23.000.000	
X X 0 1 2 0 7 0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit		32.500.000	
X X 1 2 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					617.000.000	
X X 1 2 0 8 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan		2.000.000	
X X 1 2 0 8 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan		90.000.000	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan			
X X 1 2 0 8 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan		525.000.000	
X X 1 2 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					146.426.100	

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2024			Kebutuhan Dana	Keterangan
		Target Capaian Kinerja				
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					55.500.000	
Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	23.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	32.500.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					617.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Temanggung		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	2.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	90.000.000	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Temanggung		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	525.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					146.426.100	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024					Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
	Pemerintahan Daerah						
X X X 1 0 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Temanggung		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	78.000.000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan		
X X X 1 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	60.426.100	
X X X 1 0 9 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPRKPLH Kab. Temanggung		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	8.000.000	
2 1 1 2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		100%	200.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024					Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
	Pemerintahan Daerah						
X X X 1 0 9 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Temanggung		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	78.000.000	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan		
X X X 1 0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 unit	60.426.100	
X X X 1 0 9 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DPRKPLH Kab. Temanggung		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	8.000.000	
2 1 1 2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		100%	750.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				
		Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
			Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup		100%	
2.1.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					50.000.000
2.1.2.01.2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000
2.1.2.02	PENYELENGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA					150.000.000
2.1.2.02.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung		Jumlah Dokumen KLHS Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	150.000.000

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2024			Kebutuhan Dana	Keterangan
		Target Capaian Kinerja				
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
		Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup		100%		
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota					450.000.000	
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)		400.000.000	Dasar pembuatan analisis Daya Tampung dan Daya Dukung sebagai dasar penyusunan Dokumen antara lain RPJMD, RTRW dll
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	50.000.000	
PENYELENGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)					300.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				
		Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
2	1301		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	48,00	800.000.000
				Indeks Kualitas Udara	83,50	
				Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	0,067%	
2	1301		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			400.000.000
2	1301		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Kabupaten Temanggung	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen 50.000.000

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2024				Keterangan
		Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
KABUPATEN/KOTA						
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD		Jumlah Dokumen KLHS RPJMD	1 dokumen	150.000.000		Tindaklanjut surat edaran Kemendagri Nomor 660.1/5113/B angda tanggal 6 juli 2022 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS dalam rangka penyusunan RPJPD dan RPJMD
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Indeks Kualitas Air	48,00	950.000.000		
		Indeks Kualitas Udara	83,50			
		Persentase Luas Lahan Kritis Tertangani terhadap Total Luas Lahan Kritis	0,067%			
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				550.000.000		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup	Kabupaten Temanggung	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 dokumen	50.000.000		

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				
		Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
	Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					
21031303	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	25 laporan	350.000.000
210333	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					400.000.000
210334	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kabupaten Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 dokumen	400.000.000
214	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani		63,90%	1.500.000.000
2141	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					1.500.000.000

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2024				Keterangan
		Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			Tanah, Air, Udara, dan Laut			
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	DPRKPLH Kabupaten Temanggung		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	25 laporan	500.000.000	Dalam melaksanakan validasi terhadap uji analisis air, udara dan pengolahan limbah B3 membutuhkan laboratorium terakreditasi dan teregistrasi
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					400.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kabupaten Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1 dokumen	400.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Luas RTH Milik Pemerintah Daerah yang Tertangani		63,90%	1.500.000.000	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota					1.500.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024					Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
21402	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Hutan Kota dan Kebun Ngipik Pringsurat		Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5,07 ha	100.000.000	
				Terpeliharanya Hutan Kota dan Kebun Ngipik milik Pemda	12 bulan		
21404	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kabupaten Temanggung		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7,96 ha	1.400.000.000	
		Kabupaten Temanggung		Terpeliharanya Taman Kota	12 bulan		
215	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3		100%	15.000.000	
21501	Penyimpanan sementara Limbah B3					15.000.000	
21501	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Temanggung		Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 dokumen	15.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024					Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
21402	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Hutan Kota dan Kebun Ngipik Pringsurat		Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5,07 ha	100.000.000	
				Terpeliharanya Hutan Kota dan Kebun Ngipik milik Pemda	12 bulan		
21404	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kabupaten Temanggung		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7,96 ha	1.400.000.000	
		Kabupaten Temanggung		Terpeliharanya Taman Kota	12 bulan		
215	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase usaha yang memiliki Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3		100%	15.000.000	
21501	Penyimpanan sementara Limbah B3					15.000.000	
21501	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Temanggung		Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 dokumen	15.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				
		Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
216	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup		100%	50.000.000
21601	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					50.000.000
21603	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		50 laporan	50.000.000
218	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN		Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan		28,60%	50.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				Keterangan	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
			Secara Elektronik				
216	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup		100%	50.000.000	
21601	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					50.000.000	
21603	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		50 laporan	50.000.000	
218	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN		Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan		28,60%	200.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024				
		Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
	HIDUP UNTUK MASYARAKAT					
21801	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000	
21802	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kabupaten Temanggung		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	10 sekolah	50.000.000
					2 kampung iklim	
					1 kelompok	
219	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Tercapainya persentase penghargaan bidang lingkungan hidup		100%	100.000.000
21901	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2024				Keterangan
		Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
HIDUP UNTUK MASYARAKAT						
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					200.000.000	
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kabupaten Temanggung		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	10 sekolah	200.000.000	Memfasilitasi sarana dan prasarana dalam kegiatan sekolah Adiwiyata (tempat sampah, biopori, tanaman)
					2 kampung iklim	
					1 kelompok	
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Tercapainya persentase penghargaan bidang lingkungan hidup			100%	100.000.000
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024					Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
21901	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Temanggung		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	16 individu, desa/kelurahan, kelompok masyarakat dan lembaga	100.000.000	
2110	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti		100%	10.000.000	
21101	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					10.000.000	
21101	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti /Ditangani	1 dokumen	10.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024					Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
21901	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kabupaten Temanggung		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	16 individu, desa/kelurahan, kelompok masyarakat dan lembaga	100.000.000	
2110	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti		100%	10.000.000	
21101	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					10.000.000	
21101	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti /Ditangani	1 dokumen	10.000.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024					Pagu Indikatif
		Lokasi	Target Capaian Kinerja				
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2111	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase sampah yang tertangani		60,21%	10.897.780.000	
			Cakupan layanan persampahan		60,00%		
2111	Pengelolaan Sampah					10.897.780.000	
2111	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kota		12 bulan	4.980.800.000	
			Terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan		12 bulan		
			Terlaksananya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan		12 bulan		
			Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		51.100 Ton		
2111	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (pembangunan TPS 3R)		9 unit	5.786.980.000	

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	Keterangan
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase sampah yang tertangani		
		Cakupan layanan persampahan		60,00%		
Pengelolaan Sampah					16.786.980.000	
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kota		12 bulan	6.000.000.000	BBM 2 M Upah 2,6 M Pemeliharaan, Suku cadang 1,4 M
		Terlaksananya peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan		12 bulan		
		Terlaksananya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan		12 bulan		
			Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		51.100 Ton	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Kabupaten Temanggung	Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan (pembangunan TPS 3R)		9 unit	5.786.980.000	

Kode Rekening	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024					Keterangan
		Lokasi	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif	
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
211207	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung		Terlaksananya Pemeliharaan dan Operasional UPT Pengelolaan TPA-IPLT Sanggrahan	12 bulan	130.000.000	
JUMLAH BELANJA LANGSUNG						41.278.719.556	

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana	Keterangan
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung			
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					48.284.119.556	

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung. Namun dalam proses ini DPRKPLH Kabupaten Temanggung mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.39
Usulan-Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kelurahan Kebonsari Kecamatan Temanggung	Terbangunannya gedung sampah anorganik dan tempat Magot	1 unit gedung sampah Volume 9 x 12 M2 tanpa dinding full	200.000.000
		Desa Blimbing Kecamatan Kandangan	Terlaksananya pengembangan TPSD dan pengadaan alat pemilah	1 paket	185.000.000
		Desa Pingit Kecamatan Pringsurat	Terlaksananya pembangunan sarana prasarana pengelolaan sampah	1 Paket	300.000.000
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10				
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Karangtejo Kecamatan Kedu	Pembangunan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	12 Unit	
		Kecamatan Kaloran	Pembangunan rumah tidak layak	13 Unit	Setiap desa 1 unit

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/ Besaran	Catatan
			huni menjadi layak huni		
		Desa Karangseneng Kecamatan Gemawang	Pembangunan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	9 Unit	
		Kecamatan Parakan	Pembangunan rumah tidak layak huni menjadi layak huni	32 Unit	Setiap Desa/ Kelurahan 2 unit

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di DPRKPLH Kabupaten Temanggung ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 40
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2021-2023

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Dukungan				
1	Temanggung Bebas Sampah	DPRKPLH, Kecamatan, Masyarakat Desa/ Kelurahan	APBD	Program Temanggung Bebas Sampah merupakan program dalam bentuk pedoman pengelolaan sampah di tingkat desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dengan membentuk sistem kelembagaan terstruktur dari tingkat kabupaten hingga rukun tetangga yaitu Dewan Persampahan dan Fasilitator Persampahan Kecamatan yang ditunjuk oleh Bupati kemudian Fasilitator Persampahan Desa dan Pegiat Sampah Rukun Tetangga yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa. Tujuan pembentukan kelembagaan ini adalah agar pengelolaan sampah dapat digerakkan mulai dari skala terkecil yaitu rumah tangga dan setiap tingkatannya dapat termonitoring oleh Pemerintah Daerah supaya jumlah sampah yang ada di lingkungan dan di TPA dapat diminimalkan. Dalam pelaksanaan program ini, didukung dengan pembentukan regulasi mulai dari Perda hingga Perdes. Selain itu dibuat juga aplikasi pengelolaan sampah yang dapat menghimpun data pengelolaan sampah dari unit terkecil seperti Bank Sampah dan TPS hingga data TPA, dapat mengatur jadwal pengangkutan sampah oleh Pemda dan dilengkapi dengan fitur aduan sampah liar oleh masyarakat.	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan persampahan	DPRKPLH 2021-2022
2	Gerakan Konservasi Tanah dan Air Berkelanjutan	Pemerintah, swasta, masyarakat.	KLHK, APBD, CSR, perusahaan/ BUMN, dan institusi pendidikan	Gerakan Konservasi Tanah dan Air Berkelanjutan merupakan gerakan bersama dalam rangka penanganan lahan kritis di Kabupaten Temanggung, khususnya di lereng Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan Gunung Prau. Gerakan ini menitikberatkan pada keterlibatan semua unsur, baik dari sisi Pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Bentuk gerakan ini berupa gerakan penanaman pohon (tanaman konservasi dan tanaman produktif) secara masif di wilayah Gunung Sumbing,	Gerakan Konservasi Tanah dan Air Berkelanjutan	Meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Temanggung akan pentingnya konservasi untuk menjaga kelestarian tanah dan air.	DPRKPLH 2021-2022

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Dukungan				
				<p>Sindoro, dan Prau yang dilaksanakan oleh relawan bersama masyarakat Temanggung. Bibit pohon yang ditanam berasal dari bantuan pihak ketiga diantaranya KLHK, CSR perusahaan/BUMN, dan institusi pendidikan. Gerakan ini diharapkan dapat membawa manfaat baik dari sisi lingkungan maupun dari sisi ekonomi, sehingga pengendalian ekosistem di Temanggung dapat berjalan beriringan dengan hasil ekonomi yang didapat dari tanaman produktif yang ditanam. Gerakan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Temanggung akan pentingnya konservasi untuk menjaga kelestarian tanah dan air.</p>			

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui DPRKPLH Kabupaten Temanggung ada 16 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.41
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2023

NO.	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
A. Tahun 2021				
1	Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2021: SD Negeri 2 Kundisari	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	DPRKPLH
2	Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2021: SMP Negeri 1 Kandangan	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	DPRKPLH
B. Tahun 2022				
1	Lokasi Program Kampung Iklim Kategori Utama : Desa Gununggempol Kecamatan Jumo	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	DPRKPLH
2	Program Kampung Iklim dengan Kategori Madya : Desa Banaran Kecamatan Tembarak	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	DPRKPLH
3	Juara Harapan 3 Lomba Habitat Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 : Rowali Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
4	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 : SDN Tlahap Kecamatan Kledung	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
5	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengan Tahun 2022 : MI Negeri 2 Temanggung	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
6	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengan Tahun 2022 : SMP Negeri 3 Kedu	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
7	Juara II Sekolah Hijau Tingkat Jateng-DIY: MI Muhammadiyah Purwodadi Tembarak	Ketua MLH PP Muhammadiyah	Jateng-DIY	DPRKPLH
C. Tahun 2023				
1	Juara harapan I Lomba Habitat tingkat Provinsi untuk kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
2	Penghargaan Kalpataru 2023: a.n. Fatah Syaifur Rochman	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Nasional	DPRKPLH
3	Lomba Wana Lestari Kategori Kader Konservasi Alam, a.n. R. Gravita Eka Purnama	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH

NO.	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	SKALA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
4	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : SMP Negeri 1 Kaloran	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
5	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Jumo	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
6	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : SD Muhammadiyah Parakan	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH
7	Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : MI Muhammadiyah Purwodadi Tembarak	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	DPRKPLH

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

DPRKPLH Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Kesesuaian Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang sejalan dengan Tupoksi DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024
dengan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN 2020-2024	Sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026	Indikator Sasaran	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah
Agenda 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan Dasar	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Wilayah	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni
Agenda 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Air (IKA) - Indeks Kualitas Udara (IKU)



PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	STRATEGI	SASARAN
Infrastruktur Pelayanan Dasar	Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangka	70% Rumah tangga menempati hunian layak
	Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	90% Hunian dengan akses sanitasi layak, termasuk akses aman 15%

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	STRATEGI	SASARAN
Infrastruktur Perkotaan	Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan	Hunian dengan akses sampah terkelola baik 80% penanganan 20% pengurangan

Sedangkan Tema RKP Tahun 2024 adalah Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu:

- 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- 3) Penguatan Daya Saing Usaha;
- 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
- 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
- 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
- 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Arah kebijakan RKP Tahun 2024 yang sejalan dengan Tupoksi DPRKPLH Kabupaten Temanggung diantaranya yaitu Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem serta Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2024, maka Tujuan dari penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2024 adalah **Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan.**

Adapun sasaran dari penyusunan Renja DPRKPLH Tahun 2024 ini adalah dalam rangka Meningkatkan Penyediaan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas. Sedangkan Sasaran DPRKPLH Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Wilayah
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Dengan menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan pada tahun 2024 secara tertib waktu dan tepat mutu dan meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program

dan kegiatan tahun 2024 sehingga dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target DPRKPLH Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi
DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024

VISI	: TEMANGGUNG MAKIN MAJU, MANDIRI, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA
MISI 5	: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA BERKELANJUTAN DENGAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP SECARA LESTARI BERBASIS PADA PARTISIPASI AKTIF SEGENAP PEMANGKU KEPENTINGAN DAN MEMPERHATIKAN DIMENSI TATA RUANG

TUJUAN	SASARAN	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	KETERANGAN
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Meningkatnya Penyediaan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas	Meningkatnya Infrastruktur Sarana dan Prasarana Wilayah	Persentase Perumahan dan Permukiman Layak Huni	%	99,02	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
			1. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	4,46	Indikator Program : Program Pengembangan Perumahan
			2. Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi	%	88,30	
			3. Persentase rumah layak huni	%	95,54	Indikator Program : Program Kawasan Permukiman
			4. Persentase kawasan kumuh perkotaan	%	4,84	
			5. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	
			6. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	
		7. Prosentase penyelesaian fasilitasi pertanahan	%	100	Indikator Program : Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	65,41	Indikator Sasaran
			A. Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	52,70	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
			B. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	83,82	
			1. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	100	Indikator Program : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

TUJUAN	SASARAN	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	KETERANGAN
			2. Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	Indikator Program : Program Perencanaan Lingkungan Hidup
			3. Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	%	100	
			4. Indeks Kualitas Air	Angka	52,70	Indikator Program : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			5. Indeks Kualitas Udara	Angka	83,82	
			6. Persentase luas lahan kritis tertangani terhadap total luas lahan kritis	%	0,067	
			7. Persentase luas RTH milik Pemerintah Daerah yang tertangani	%	63,90	Indikator Program : Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
			8. Persentase usaha yang memiliki rincian teknis pengelolaan limbah B3	%	100	Indikator Program : Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
			9. Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/ kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan hidup	%	100	Indikator Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			10. Persentase sekolah berwawasan lingkungan	%	28,60	Indikator Program : Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
			11. Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	%	100	Indikator Program : Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
			12. Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	Indikator Program : Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
			13. Persentase sampah yang tertangani	%	60,21	Indikator Program : Program Pengelolaan Persampahan
			14. Cakupan layanan persampahan	%	64,71	

Kebijakan dan strategi DPRKPLH Kabupaten Temanggung pada tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, hal tersebut dalam rangka upaya menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada penyesuaian pagu indikatif di Tahun 2024.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024

RANCANGAN RENJA DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
I	PENDAPATAN	2.329.080.000
-	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.200.000.000
-	Sewa Rusunawa	1.129.080.000
II	BELANJA	48.284.119.556
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14.756.800.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.685.000.000
A	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	685.000.000
-	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	685.000.000
a	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	685.000.000
B	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.000.000.000
-	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000.000
a	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	5.000.000.000

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	SELISIH PAGU INDIKATIF (+ / -)
I	PENDAPATAN	2.329.080.000	-
-	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.200.000.000	-
-	Sewa Rusunawa	1.129.080.000	-
II	BELANJA	48.799.834.556	515.715.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14.762.538.800	5.738.800
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	5.000.000.000	(685.000.000)
A	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		(685.000.000)
-	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		(685.000.000)
a	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		(685.000.000)
B	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.000.000.000	-
-	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000.000	-
a	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat		(5.000.000.000)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.071.800.000
A	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.201.800.000
-	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.201.800.000
a	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.201.800.000
B	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	7.870.000.000
-	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	7.870.000.000
a	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (M)	7.370.000.000
b	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	500.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	33.527.319.556
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	75.000.000
C	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	75.000.000
-	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000
a	Inventarisasi sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
b	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	33.452.319.556
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	13.090.339.556

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF (+ / -)
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	5.000.000.000	5.000.000.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.762.538.800	690.738.800
A	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.201.800.000	-
-	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.201.800.000	-
a	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.201.800.000	-
B	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	8.560.738.800	690.738.800
-	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	8.560.738.800	690.738.800
a	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	7.385.738.800	15.738.800
b	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1175000000	675.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	34.037.295.756	509.976.200
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		(75.000.000)
C	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		(75.000.000)
-	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		(75.000.000)
a	Inventarisasi sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		(50.000.000)
b	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		(25.000.000)
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	34.037.295.756	584.976.200
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.090.315.806	(23.750)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.099.413.456
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.099.413.456
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.000.000
a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	58.000.000
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.000.000
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.000.000
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	26.000.000
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.500.000
a	Pengadaan Mebel	23.000.000
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.500.000
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	617.000.000
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	525.000.000
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.426.100
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.000.000
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.426.100
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000
B	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	750.000.000

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF (+ / -)
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.099.413.456	-
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.099.413.456	-
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.986.000	(14.000)
a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	57.986.000	(14.000)
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	113.996.250	(3.750)
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.999.750	(250)
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	-
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.000.000	-
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000	-
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.997.500	(2.500)
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	29.999.000	(1.000)
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.494.000	(6.000)
a	Pengadaan Mebel	23.000.000	-
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.494.000	(6.000)
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	617.000.000	-
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	-
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	-
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	525.000.000	-
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.426.100	-
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.000.000	-
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.426.100	-
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000	-
B	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	750.000.000	-

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
-	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	450.000.000
a	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	400.000.000
b	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	50.000.000
-	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	300.000.000
a	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	150.000.000
b	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	150.000.000
C	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	950.000.000
-	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	550.000.000
a	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	50.000.000
b	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	500.000.000
-	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	400.000.000
a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	400.000.000
D	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.500.000.000
-	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.500.000.000
a	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	100.000.000
b	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.400.000.000

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF (+ / -)
-	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	450.000.000	-
a	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		(400.000.000)
b	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	50.000.000	-
c	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	400.000.000	400.000.000
-	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	300.000.000	-
a	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota		(150.000.000)
b	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	150.000.000	-
c	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	150.000.000	150.000.000
C	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	799.999.950	(150.000.050)
-	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	399.999.950	(150.000.050)
a	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	50.000.000	-
b	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	349.999.950	(150.000.050)
-	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	400.000.000	-
a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi		(400.000.000)
b	Pelaksanaan rehabilitasi	400.000.000	400.000.000
D	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.300.000.000	(200.000.000)
-	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.300.000.000	(200.000.000)
a	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan		(100.000.000)
b	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.200.000.000	(200.000.000)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
E	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	15.000.000
-	Penyimpanan sementara Limbah B3	15.000.000
a	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15.000.000
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	50.000.000
-	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
a	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
G	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	200.000.000
-	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	200.000.000
H	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100.000.000
-	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF (+ / -)
c	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	100.000.000	100.000.000
E	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	15.000.000	-
-	Penyimpanan sementara Limbah B3	15.000.000	-
a	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15.000.000	-
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	50.000.000	-
-	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	-
a	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		(50.000.000)
b	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50.000.000	50.000.000
G	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100.000.000	(100.000.000)
-	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	(100.000.000)
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	100.000.000	(100.000.000)
H	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	50.000.000	(50.000.000)
-	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	(50.000.000)

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100.000.000
I	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000
-	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	10.000.000
a	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	10.000.000
J	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	16.786.980.000
	Pengelolaan Sampah	16.786.980.000
a	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	6.000.000.000
b	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
c	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	5.786.980.000
d	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.000.000.000
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	48.284.119.556

NO	URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN PROGRAM/KEGIATAN	PAGU INDIKATIF	PAGU INDIKATIF (+ / -)
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	50.000.000	(50.000.000)
I	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.000.000	-
-	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	10.000.000	-
a	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota		(10.000.000)
b	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000
J	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	17.871.980.000	1.085.000.000
	Pengelolaan Sampah	17.871.980.000	1.085.000.000
a	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		(6.000.000.000)
b	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	400.000.000	400.000.000
c	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	5.786.980.000	-
d	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.000.000.000	-
e	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	6.685.000.000	6.685.000.000
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	48.799.834.556	515.715.000

Berdasarkan Tabel 4.1. di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Kenaikan pagu indikatif tahun 2024 pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 515.715.000,00 dari semua usulan sumber dana, hal ini disebabkan karena ada penambahan anggaran yang merupakan Aspirasi Kepala Daerah serta adanya anggaran pengadaan tanah untuk Polsek Wonobojo.
2. Pengurangan 1 (satu) urusan yang dilaksanakan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung yaitu pada Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
3. Penyesuaian pada beberapa sub kegiatan pada DPRKPLH Kabupaten Temanggung yang disebabkan karena adanya Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundangan. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI), Pemerintah Daerah wajib memutakhirkan data pembangunan dan keuangan daerah untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
4. Pengurangan anggaran pada beberapa sub kegiatan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Rencana Program dan Kegiatan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan DPRKPLH
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Keluaran Sub Kegiatan			Tolok Ukur	Target				
							2.329.080.000					2.329.080.000		
							48.799.834.556					58.660.578.754		
1							14.762.538.800					13.526.445.000		
1	03						5.000.000.000					6.000.000.000		
1	03	05					5.000.000.000					6.000.000.000		
1	03	05	2.01				5.000.000.000					6.000.000.000		
1	03	05	2.01	0039										
						Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500 Rumah Tangga	5.000.000.000	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	500 Rumah Tangga	6.000.000.000
1	04						9.762.538.800					7.526.445.000		
1	04	02					1.201.800.000					1.191.930.000		
1	04	02	2.05				1.201.800.000					1.191.930.000		
1	04	02	2.05	0002										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Keluaran Sub Kegiatan			Tolok Ukur	Target				
		-	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Kertosari - Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman - Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Wetan - Kab. Temanggung, Ngadirejo, Manggong - Kab. Temanggung, Kranggan, Kranggan	6 Dokumen	1.201.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	6 Dokumen	1.191.930.000			
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			8.560.738.800			6.334.515.000			
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			8.560.738.800			6.334.515.000			
1	04	03	2.03	0002	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni									
					-	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	365 Unit Rumah	7.385.738.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	365 Unit Rumah	6.002.000.000
1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU									
					-	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	1 Dokumen	1.175.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 Dokumen	332.515.000
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			34.037.295.756			45.134.133.754			
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			34.037.295.756			45.134.133.754			
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.090.315.806			13.154.758.754			
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.099.413.456			12.164.258.754			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Keluaran Sub Kegiatan			Tolok Ukur	Target				
2	11	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
					-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	147 Orang/bulan	12.099.413.456	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	147 Orang/bulan	12.164.258.754
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				57.986.000			0		
2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya									
					-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	158 Paket	57.986.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	158 Paket	0
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				113.996.250			124.500.000		
2	11	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
					-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	1 Paket	12.999.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.000.000
2	11	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
					-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	1 Paket	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.000.000
2	11	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
					-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	1 Paket	22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.000.000
2	11	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Keluaran Sub Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
		-	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	12 Paket	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	22.500.000
2	11	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
		-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	12 Laporan	25.997.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	27.000.000
2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	12 Laporan	29.999.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	35.000.000
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			55.494.000			70.000.000
2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						
		-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	46 Unit	23.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	46 Unit	35.000.000
2	11	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
		-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	4 Unit	32.494.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	35.000.000
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			617.000.000			623.500.000
2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
		-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	12 Laporan	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Keluaran Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
												Tolok Ukur	Target		
2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo - Kab. Temanggung, Kranggan, Sanggrahan	12 Laporan	90.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	93.000.000	
2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	12 Laporan	525.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	527.500.000	
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					146.426.100				172.500.000	
2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
					-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	22 Unit	78.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	82.500.000	
2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
					-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	1 Unit	60.426.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	80.000.000	
2	11	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Keluaran Sub Kegiatan			Tolok Ukur	Target			
		-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	25 Unit	8.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	10.000.000		
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				750.000.000					351.000.000	
2	11	02	2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				450.000.000				51.000.000	
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota								
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	51.000.000
2	11	02	2.01	0005	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH								
					Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokuman	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, PPEG, RPPKarst yang ditetapkan	1 Dokuman	0
2	11	02	2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				300.000.000				300.000.000	
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD								
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	150.000.000
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang								
					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	150.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	150.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Keluaran Sub Kegiatan			Tolok Ukur	Target				
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						804.000.000			
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						404.000.000			
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut									
					-	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	52.000.000
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota									
					-	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	-	- Kab. Temanggung, Temanggung, Sidorejo	25 Dokumen	349.999.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	25 Dokumen	352.000.000
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						400.000.000			
2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi									
					-	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Ha	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Ha	400.000.000
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						1.300.000.000			
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						1.300.000.000			
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)									
					-	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Temanggung, Parakan, Parakan Kauman	7,96 Ha	1.200.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	7,96 Ha	1.407.500.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Keluaran Sub Kegiatan			Tolok Ukur	Target				
2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan									
					-	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	-	- Kab. Temanggung, Pringsurat, Ngipik	5,07 Unit	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	5,07 Unit	100.000.000
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				15.000.000			15.075.000		
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3				15.000.000			15.075.000		
2	11	05	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik									
					-	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	15.075.000
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				50.000.000			50.250.000		
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000			50.250.000		
2	11	06	2.01	0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup									
					-	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Badan Usaha	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	50 Badan Usaha	50.250.000
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				100.000.000			200.000.000		
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000			200.000.000		
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup									

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Keluaran Sub Kegiatan			Tolok Ukur	Target		
		-	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	200.000.000	
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				50.000.000					100.500.000
2	11	09	2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000				100.500.000
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
		-	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Entitas	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	100.500.000	
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				10.000.000					1.050.000
2	11	10	2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				10.000.000				1.050.000
2	11	10	2.01	0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota							
		-	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Pengaduan	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	1 Pengaduan	1.050.000	
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				17.871.980.000					28.950.000.000
2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah				17.871.980.000				28.950.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Keluaran Sub Kegiatan			Tolok Ukur	Target				
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan									
					-	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	289 Kelompok	400.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	289 Kelompok	450.000.000
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan									
					-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	5.786.980.000	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	9 Dokumen	9.000.000.000
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota									
					-	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	-	- Kab. Temanggung, Kranggan, Sanggrahan	5 Unit	5.000.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit	13.000.000.000
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan									
					-	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA,	-	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	51100 Ton	6.685.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU,	51100 Ton	6.500.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Keluaran Sub Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
			PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan						TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		
TOTAL							48.799.834.556				58.660.578.754

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi DPRKPLH Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di DPRKPLH Kabupaten Temanggung itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan DPRKPLH Kabupaten Temanggung dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2024. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya nanti akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 29.263.067.691 (96,94%) terdiri dari belanja sebagai berikut:

- A. Belanja Operasi Rp. 28.837.009.746 (96,92%)
 - Belanja Pegawai Rp. 12.472.089.530 (96,19%)
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 15.899.920.216 (97,50%)
 - Belanja Bantuan Sosial Rp. 465.000.000 (96,88%)
- B. Belanja Modal Rp. 426.057.945 (98,60%)
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 183.819.360 (97,31%)

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 197.136.585 (99,57%)
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 45.102.000 (99,72%).

Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan semester I sebesar Rp. 10.497.965.680 (32,78%) terdiri dari belanja sebagai berikut:


- A. Belanja Operasi Rp. 10.490.165.680 (32,77%)
 - Belanja Pegawai Rp. 6.570.380.499 (54,30%)
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.919.785.181 (20,90%)
 - Belanja Bantuan Sosial Rp. - (0%)
- B. Belanja Modal Rp. 7.800.000 (41,49%)
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 7.800.000 (41,49%).

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 DPRKPLH Kabupaten Temanggung mendapat alokasi anggaran Belanja Program sebesar Rp. 48.799.834.556,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
9. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan HIDUP (PPLH)
10. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
11. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
12. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
13. Program Pengelolaan Persampahan.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran DPRKPLH Kabupaten Temanggung dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 3 Juli 2023
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG.



HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Gerilya Nomor 20 Maron Sidorejo Temanggung Kodepos 56221 Telepon/Faximili (0293) 4901569
surat elektronik : dprkplh.temanggungkab@gmail.com laman : <https://dprkplh.temanggungkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 050/48 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
b. bahwa untuk maksud di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 132);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 123);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
 - b. Merumuskan Rencana Kerja DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2024.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini

bertanggungjawab kepada Kepala DPRKPLH Kabupaten Temanggung;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dipandang perlu akan dilakukan penggantian, dan segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 14 Juni 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG.



HENDRA SUMARYANA, M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Temanggung;
 2. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DPRKPLH
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 050/ 48 / 2023
TANGGAL : 14 JUNI 2023

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala DPRKPLH	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris DPRKPLH	Ketua
3.	Kasubbag Keuangan	Sekretaris
4.	Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
5.	Kabid Tata Lingkungan	Anggota
6.	Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
7.	Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan	Anggota
8.	Ka. UPT Laboratorium Lingkungan	Anggota
9.	Ka. UPT Pengelolaan TPA - IPLT	Anggota
10.	Ka. UPT Rusunawa	Anggota
11.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
12.	Staf Perencanaan	Anggota

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG,


HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003